

**ANALISIS PERANAN AUDITOR INTERNAL DALAM MENDETEKSI
DAN MENCEGAH KECURANGAN (*FRAUD*) PADA
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Oleh
ANITA
NIM 105730546615



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

**ANALISIS PERANAN AUDITOR INTERNAL DALAM MENDETEKSI
DAN MENCEGAH KECURANGAN (*FRAUD*) PADA
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Oleh
ANITA
NIM 105730546615

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari Ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya lah kami menyembah dan KepadaNya lah kami Mohon Pertolongan.

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada :

Bapak dan ibuku yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku
Kakak dan Adik-adikku yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku
Teman-teman AK.15 H yang selalu memberikan dukungan dan motivasi
Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Auntansi
Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

MOTTO :

“ sesungguhnya Allah tidak merubah keadan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar. Ra'd :11)

“Dan Bahwasannya seorang manusia tida memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (An Najm : 39)

“Dibalik kesulitan ada kemudahan dan diantara seribu kesulitan kutanamkan satu kesabaran” (Penulis)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat :Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : “ Analisis Peranan Auditor Internal dalam Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan (*Fraud*) pada Pemerintah Kota Makassar”.

Nama Mahasiswa : Anita
No. Stambuk/NIM : 105730546615
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 14 September 2019 di Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 September 2019

Menyetujui.,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Nurniah, SE., MSA., Ak., CA.
NIDN : 0017096604

Ismail Rasulong, SE., MM.
NBM : 903 078

Mengetahui

Ketua Program Studi,

Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP
NBM: 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat :Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Anita, NIM:105730546615**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 145/ Tahun 1440 H/2019 M, Tanggal 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Muharram 1441 H
17 September 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman SE, MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Ansyarif, SE., M.Si., Ak (.....)
2. Chairul Ihsan Burhanuddin, SE.,M.Ak (.....)
3. Sitti Zulaeha, S.Pd., M.Si (.....)
4. Dr. Edi Jusriadi, SE., MM (.....)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat :Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anita
Nim : 105730546615
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : “Analisis Peranan Auditor Internal dalam Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan (*Fraud*) pada Pemerintah Kota Makassar”.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 17 September 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
6000

Anita

Diketahui Oleh:

Dekan

Ketua Program Studi

Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903078

Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP
NBM : 107 34 28

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhmdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmad dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “ Analisis Peranan Auditor Internal dalam Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan (*Fraud*) pada Pemerintah Kota Makassar”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Mursan dan Ibu Baeti yang senantiasa member harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. CSP, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Nurniah, SE., M. SA. Ak. CA, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bias saya tulis satu-persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepad semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 30 Agustus 2019



ABSTRAK

ANITA, (2019) Analisis Peranan Auditor Internal dalam Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan (*Fraud*) pada Pemerintah Kota Makassar, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Nurniah dan Pembimbing II Ismail Rasulong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan auditor internal Inspektorat Daerah Kota Makassar dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan Pemerintah Kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari data primer yaitu melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Responden penelitian ini adalah tim auditor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengawasan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif menggunakan metode presentase Dean J. Champion.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa auditor internal Inspektorat Daerah Kota Makassar sangat berperan efektif dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan pada pemerintah kota. Hasil ini dapat dilihat dari hasil hitungan jawaban kuesioner sebesar 80.2%. Selain itu auditor internal ispektorat sangat berperan dalam pemberian pendampingan, pembinaan serta pengawasan dan pemeriksaan secara regular atau dalam pemeriksaan tertentu.

Kata Kunci : Peranan Auditor Internal, Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*), Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR/ BAGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
1. Audit Internal	11
2. Pengertian Audit Internal	11

3.	Peran Audit Internal.....	12
4.	Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal	14
5.	Aktivitas Audit Internal.....	17
6.	Tahap-Tahap Audit Internal.....	17
7.	Standar Professional Audit Internal.....	20
8.	Kecurangan (<i>Fraud</i>)	23
B.	Penelitian Terdahulu.....	33
C.	Kerangka Pikir.....	38
BAB III	METODE PENELITIAN	40
A.	Jenis Penelitian	40
B.	Tepat dan Waktu Penelitian.....	40
C.	Sumber Data.....	40
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	41
E.	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN	45
A.	Gambaran Umum.....	45
1.	Sejarah Singkat Inspektorat Daerah Kota Makassar.....	45
2.	Visi dan Misi Organisasi	46
3.	Struktur Oganisasi	47
4.	Uraian Pekerjaan.....	49
B.	Deskripsi Data Resonden	50
1.	Responden Berdasarkann Jenis Kelamin	50
2.	Responden Berdasarkan Usia.....	51

3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	52
4. Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	52
5. Data Responden Berdasarkan Jabatan	53
C. Analisis Hasil Kuesioner	54
1. Peranan Auditor Internal	54
2. Pendeteksian Kecurangan	61
3. Pencegahan Kecurangan.....	64
D. Pembahasan.....	67
1. Peranan Auditor Internal Inspektorat	67
2. Pendeteksian Kecurangan	70
3. Pencegahan Kecurangan	73
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indeks Persepsi korupsi Indonesia 2017	6
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1	Pedoman Efektifitas peranan audit internal	40
Tabel 4.1	Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 4.2	Data Responden Berdasarkan Usia	51
Tabel 4.3	Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	52
Tabel 4.4	Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja	53
Tabel 4.5	Data Responden Berdasarkan Jabatan	54
Tabel 4.6	Hubungan Auditor Internal dengan Unit yang di audit	55
Tabel 4.7	Auditor Internal Memeriksa Kegiatan	55
Tabel 4.8	Hasil Pekerjaan Auditor Internal Ditinjau Dahulu	56
Tabel 4.9	Auditor Internal Bertanggung Jawab Kepada Unit Audit	56
Tabel 4.10	Auditor Internal Tidak Mempunyai Hubungan Kekerabatan	57
Tabel 4.11	Auditor Internal dengan Objek yang diaudit sering terjadi konflik	57
Tabel 4.12	Staf Auditor Internal Mendapat Sanksi	58
Tabel 4.13	Auditor Internal Memiliki Pegawai yang Bekulifikasi	58
Tabel 4.14	Auditor Internal telah Lulus dalam Mengikuti masa Pelatihan	58
Tabel 4.15	Pihak Auditor Internal melaksanakan Pengawasan	59
Tabel 4.16	Auditor memastikan system SKPD sesuai yang direncana	59
Tabel 4.17	Auditor Harus memperoleh Informasi kegiatan pemeriksaan	60
Tabel 4.18	Auditor mendiskusikan dengan pihak Manajemen	60

Tabel 4.19	Auditor Melakukan Monitor terhadap Tindak Lanjut	61
Tabel 4.20	Auditor sudah melakukan Identifikasi Kecurangan	61
Tabel 4.21	Auditor Sudah Melakukan Pengawasan Terhadap Kecurangan	62
Tabel 4.22	Auditor Internal telah melakukan Verifikasi Transaksi dan nalisis	62
Tabel 4.23	Auditor Internal Menerapkan Prosedur Peneteksian	63
Tabel 4.24	Pihak Manajemen Sudah Membuka Media Audit	63
Tabel 4.25	Audit Internal sudah menetapkan Anti Fraud	64
Tabel 4.26	Auditor nternal Melakukan Pengawasan yang Ketat	64
Tabel 4.27	Sistem Pengendalian yang Memadai	65
Tabel 4.28	Pemisahan yang jelas sesuai masing-masing Unit	65
Tabel 4.29	Media yang digunakan Untuk Menampung Informasi	65
Tabel 4.30	Tim Khusus yang dibentuk untuk mencegah Kecurangan	66
Tabel 4.31	Tindak Lanjut yang cepat atas Temuan Kecurangan	67
Tabel 4.32	Rekaptulsi Jawaban Peranan Auditor Internal	67
Tabel 4.33	Rekaptulasi Jawaban Pendeteksian Kecurangan	70
Tabel 4.34	Rekaptulasi Jawaban Pencegahan Kecurangan	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Segi Tiga Kecurangan (<i>Fraud Trigles</i>)	28
Gambar 2.2	Kerangka Pikir	39
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan dalam mewujudkan *Good Governance*, pemerintah perlu memiliki dan melaksanakan sistem pengendalian dalam organisasi guna mendapatkan kinerja aparat pemerintah yang baik. Hal ini tidak terpisahkan oleh adanya sistem pengendalian dan pengawasan di setiap instansi pemerintah yang secara sistematis terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggung jawaban secara efektif, efisien, dan terkendali.

Dalam mengaktifkan penyelenggaraan sistem pengendalian, audit internal merupakan suatu pengawas intern dan membina penyelenggaraan sistem pengendalian pemerintah. Perkembangan profesi audit internal dari masa ke masa memberikan gambaran, peran dan fungsi penting mengenai keberadaan audit internal bagi organisasi. Sebagaimana di definisikan oleh *Institutie of Internal Auditors* (IIA) (Zamzami et al., 2018:1)

“Internal Auditors is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve on organization’s opration. It helps on organization accomplish its objectives by bringing a systematic discimplied approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance proses”

Merujuk pengertian audit internal oleh IIA tersebut, dapat kita ketahui bahwa audit internal merupakan kegiatan assurance dan konsultasi yang di lakukan secara independen dan objektif yang di rancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organiasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang

sistematik dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian dan tata kelola.

Definisi tersebut diperkuat oleh peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 menyatakan bahwa pengawas intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawas intern dapat kita ketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan. Selain itu, pengawas intern atas penyelenggaraan pemerintah di perlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Salsabila dan Prayudiawan, 2011).

Sementara itu, kedudukan audit internal dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam konteks pengawasan sejatinya telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman dan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Ketetapan tersebut menyatakan bahwa pengawasan dilaksanakan oleh aparat pengawas intern yaitu inspektorat jendral departemen, unit pengawasan lembaga pemerintah non departemen, inspektorat propinsi, dan inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya.

Dengan demikian, secara luas inspektorat daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab sebagai auditor internal yang bekerja dalam pencapaian

tujuan organisasi pemerintah daerah. Kemudian, Amrizal (2004) mengemukakan kegiatan-kegiatan utama auditor internal yaitu: (1) Mampu menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal; (2) Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen; (3) Memastikan seberapa jauh harta perusahaan di pertanggung jawabkan dan di lindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan; (4) Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat di percaya; (5) Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen; (6) Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut secara garis besar dapat di indikasikan bahwa auditor internal antara lain memiliki peranana dalam: (a) Mencegah kecurangan (*fraudprevention*); (b) Pendeteksian kecurangan (*fraud detection*); (c) Penginvestigasian kecurangan (*fraud investigation*). Dengan demikian audit internal merupakan lembaga yang secara langsung menerima dampak atas pendekatan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian terhadap kecuranga (*fraud*).

Pengendalian internal memiliki peranan yang besar dalam pelaksanaan tata kelolaan pemerintahan yang baik. Setiap komponen pengendalian intern memiliki fungsi masing-masing dalam mewujudkan akuntabilitas publik yang juga menjadi tujuan anggaran. Sehingga diharapkan dengan adanya

pengendalian internal yang memadai tidak memberikan celah untuk terjadinya kecurangan pada keuangan Negara/daerah.

Menurut Tuannako (2007) yang sejalan dengan *Assosiation of Certified Fraud Examination (ACFE)* kategori kecurangan terdiri dari tiga kelompok yaitu: Pertama, kecurangan laporan keuangan, dapat di definisikan sebagai kecurangan yang di lakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material atas laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini bersifat *Financial* atau *non financial*; Kedua, penyalagunaan asset lainnya serta pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan secara curang, dan yang terakhir Korupsi, menurut ACFE, korupsi terbagi kedalam pertentangan kepentingan, suap, pemberian ilegal, dan pemerasan.

Sebagai badan pengawasan daerah, inspektorat mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, tentang pelaksanaan pembinaan atas penyelenggraan pemerintahan yang dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi: (1) Perencanaan program pengawasan; (2) Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan; (3) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Sebagaimana yang dijelaskan Zamzami, et al.,(2018:23) 2120- Aktifitas audit internal harus mengevaluasi potensi terjadinya kecurangan dan bagaimana organisasi mengelola resiko kecurangan.

Secara teoritis, seluruh gambaran di atas menunjukkan adanya ekspektasi terhadap pengawasan internal pemerintah (inspektorat) dan di harapkan mampu mengidentifikasi dan mengurangi gejala *fraud*. Sebagaimana Zamzami et al., (2018:7) menerangkan sasaran penting audit internal berfokus pada pencegahan dan pendeteksian adanya *fraud* untuk

membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan pendekatan penilaian resiko (*risk assessment*). Oleh karenanya keberadaan inspektorat sangatlah strategis, sebagai katalisator dan dinamisator dalam menyukseskan pembangunan yang berkaitan dengan kelancaran jalannya pemerintahan daerah, optimalnya pembangunan, pembinaan aparatur daerah, dan sebagainya. Sehingga inspektorat daerah sebagai pengawas internal dapat menjadi tombak untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi menuju *good governance*.

Namun disisi lain, fakta Indonesia menunjukkan masih banyak terjadi ketimpangan dalam pengawasan intern khususnya di instansi pemerintahan. Bagi mereka yang berkecimpung di dunia pengawasan (baik internal maupun eksternal), hal tersebut sebenarnya bukanlah hal yang baru dan mengejutkan. Terlebih oleh kepala instansi, bagi kepala instansi hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan alasan tidak mengetahui ataupun tidak menyadari jika adanya penyimpangan kebijakan atau kecurangan di instansinya.

Praktik korupsi di Indonesia yang sudah terjadi meraja lela merupakan suatu bentuk kecurangan (*fraud*) yang sangat mencolok. Praktik-praktiknya berupa penyalagunaan wewenang, penyuapan, kolusi, dan nepotisme, serta pemanfaatan uang Negara yang sangat besar untuk kepentingan pribadi. Ironisnya, meskipun pemerintah sudah berupaya untuk memberantasnya, namun praktik-praktik korupsi tersebut makin berlangsung dan meraja lela bahkan mengalami persentase peningkatan di setiap tahunnya. Ketua komisi pemberantas korupsi (KPK) Agus Rajardjo mengatakan, pertumbuhan indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia paling tinggi dibandingkan Negara-negara

lain di dunia. Skor IPK dari tahun 2016-2017 sejajar dari 37 menjadi 37 lagi. Agus memaparkan bahwa IPK Indonesia terendah tahun 1998, namun seiring perkembangan, IPK Indonesia mengalami pertumbuhan meskipun belum ideal (<https://nasional.compas.com/read/2018/12/04/10400111/ketua-pertumbuhan-persepsi-indonesia-tertinggi-dunia>, diakses 4 Maret 2019).

Meluasnya korupsi di Indonesia juga dapat dilihat dari semakin tingginya aliran dana gelap yang di lacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia menjadi salah satu keprihatinan yang memerlukan perhatian lebih. Karena bukan lagi sebagai masalah tetapi sudah menjadi jalan hidup (*way of life*). Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 yang berisi peringkat tingkat korupsi di beberapa kota berdasarkan Indeks Prestasi Korupsi (IPK) hasil survey 2017.

Tabel 1.1. Peringkat tingkat Korupsi di beberapa kota di Indonesia skor IPK 2017.

No.	KOTA	IPK
1.	Jakarta Utara	73,9
2.	Pontianak	66,5
3.	Pekanbaru	65,5
4.	Balikpapan	64,3
5.	Banjarmasin	63,7
6.	Padang	63,1
7.	Manado	62,8
8.	Surabaya	61,4
9.	Semarang	58,9
10.	Bandung	57,9

11.	Makassar	53,4
12.	Medan	37,4

Sumber : Indeks Persepsi korupsi Indonesia 2017 (diakses 5 Maret 2019)

Berdasarkan perhitungan IPK 2017, dapat dilihat bahwa diantara 12 kota yang di survey, Jakarta Utara yang memiliki IPK yang paling tinggi dengan nilai 79,9 poin. Hal ini bisa di simpulkan bahwa pelaku usaha di Jakarta menilai komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi sangat baik. Sedangkan IPK terendah dari kota Medan dengan nilai 37,4 pion, dimana para pelaku usaha menilai masih banyak terjadi korupsi. Rerata indeks persepsi korupsi ahun 2017 ini berada pada poin 60,8 pada rentang 0-100, rerata 60,8 menandakan berada tipis diatas rata-rata.

Dalam survey ini, potensi korupsi dikenali dalam 5 kategori: prevalensi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi, dan efektivitas pemberantasan korupsi. Kategori-kategori tersebut dapat mewakili interaksi korupsi yang terjadi antara pengusaha dan pejabat publik. Nilai indek diukur dalam skala 0-100, dimana angka 0 merefleksikan paling korup dan 100 dinilai sebagai bebas korups. Berdasarkan presentase tabel 1.1 Kota Makassar berada pada urutan ke sebelas dengan presentase 53.4 ini menunjukkan masih cukup besar praaktik korupsi yang ada.

Praktik penyimpangan lain yang sering terjadi di Indonesia yaitu terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBD, dimana prkatik ini sering terjadi dan sangat marak di pemerintah daerah. Sebagaimana dikatakan oleh Koordinator Sulawesi Selatan Unit Supervisi Pencegahan KPK RI, Dwi Aprillia Linda, ada beberapa titik rawan korupsi yaitu perencanaan dan pelaksanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, lemahnya pengawasan,

menajemen SDM, dan perizinan atau penyalahgunaan publik. Sehingga, tak salah jika dana aspirasi, pembagian jatah proyek, dan perjalanan dinas tak lepas dari puasaran korupsi, dan hal tersebut terjadi hampir setiap daerah.(Makassar.tribunnews.com, diakses 5 Maret 2019).

Sesungguhnya kecurangan (*fraud*) yang terjadi di lingkungan instansi pemerintahan bukan hanya perjalan dinas dan korupsi, tetapi masih banyak lagi modus kecurangan lainnya. Hampir semua proses bisnis dan pelayanan pemerintah, pusat maupun daerah masih sangat sarat dengan kecurangan dan KKN. Kecendrungan korupsi yang terjadi seperti proyek pengadaan barang dan jasa bahkan hingga suap memenangkan tender proyek, penyimpangan penerimaan Negara/daerah, pungutan tidak resmi, penyalahgunaan wewenang, kontribusi pihak swasta yang tidak di pertanggung jawabkan, dan bantuan dana antar instansi yang di pertanggung jawabkan secara tidak benar.

Dari beberapa bentuk kecurangan di atas, tidak dapat di hindari lagi pertanyaan apakah inspektorat sebagai pengawasan intern mampu menjalankan fungsi dan wewenangnya sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap instansi/SKPD sebagaimana yang tertulis dalam konsep pemerintah dalam rangka mencapai *good governance*? Sebaliknya apakah inspektorat ikut berperan dalam proses pembiaran terjadinya *fraud*? Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Analisis Peranan Auditor Internal dalam Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan (*Fraud*) pada Pemerintah Kota Makassar**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu :”Bagaimana Peranan Auditor Internal dalam Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan pada Pemerintah Kota Makassar?”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Auditor Internal dalam Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan pada Pemerintah Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan praktis dan kegunaan teoritis.

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah/kota mengenai seberapa jauh peranan audit internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan. Permasalahan ini sangat penting dikemukakan karena tidak menutup kemungkinan akan menjadi ketidak konsistenan peran dan fungsi auditor sebagai bagian dari salah satu fasilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah/kota. Selain itu, audit internal merupakan pilar utama dalam sistem pengawasan keuangan pemerintah, oleh karena itu, auditor internal harus menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti di bidang audit internal khususnya di sektor pemerintahan. Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan dan akademisi khususnya untuk menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang lebih lanjut yang berkaitan dengan maslaah ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Audit Internal

Faktor utama di perlukanya audit internal adalah meluasnya rentang kendali yang dihadapi instansi pemerintah daerah yang memiliki ribuan pegawai serta pengelola kegiatan yang bervariasi sesuai dengan bidang yang ada. Sehingga, berbagai penyimpangan dan ketidak wajaran bisa saja terjadi dalam penyelenggaraan laporan keuangan daerah ataupun yang bersifat non keuangan merupakan potensial masalah nyata yang harus dihadapi.

Untuk mendeteksi dan mencegah berbagai masalah yang ada, pada sistem tata kelola pemerintahan maka diperlukan audit internal untuk melakukan pengawasan sekaligus pembinaan. Oleh karena itu, diperlukannya pengujian dan pengevaluasian pada kegiatan-kegiatan pemerintah tersebut.

2. Pengertian Audit Internal

The Institute of Internal Auditor (IIA) sebagai lembaga konsorsium auditor internal secara internasional mendefinisikan audit internal yang dikutip oleh Zamzami et al., (2018:1) dalam bukunya yang berjudul *Audit Internal Konsep dan Praktik (Sesuai International Standards for the Professional Practice Of Internal Auditing 2013)*:

Audit internal merupakan kegiatan assurance dan konsultasi yang di lakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk

memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan tata kelola.

Definisi lain dalam Harwida et al., menurut Sawyer (2005:6) :

Auditor internal adalah kegiatan penilaian secara objektif dan sistematis yang dilakukan oleh auditor internal terhadap kegiatan operasi dan pengendalian dalam suatu organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasional telah disajikan dengan akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko atas perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisir; (3) peraturan umum serta kebijakan dan prosedur internal yang sesuai telah dijalankan; (4) standar yang telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan perusahaan dapat dicapai dengan efektif.

Sedangkan menurut Standar Professional Audit Internal (SPAI):

audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi.

3. Peranan Audit Internal

Secara umum ada beberapa peran yang dijalankan oleh auditor internal dalam melaksanakan tugasnya, yaitu peranan auditor internal sebagai pengawas, konsultan, dan katalis. Ketiga peranan auditor internal tersebut dapat dikatakan sebagai peran utama yang dijalankan oleh auditor internal pada perusahaan.

1. Peranan Auditor Internal Sebagai Pengawas

Peranan dari auditor internal salah satunya adalah peran sebagai “*watchdog*” pada awalnya audit internal lebih banyak berperan sebagai mata dan telinga manajemen karena manajemen butuh kepastian bahwa kebijakan yang di tetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang oleh pegawai. Peran ini merupakan peran yang di lakukan oleh auditor internal sejak dahulu. Orientasi audit internal lebih banyak dilakukan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap ketentuan tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap ketentuan yang ada. Namun secara berangsur-angsur peran ini mulai ditinggalkan.

Peranan sebagai pengawas, auditor akan melakukan aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, dan pengujian transaksi yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang telah di tetapkan.

2. Peranan Auditor Internal Sebagai Konsultan

Peranan audit sebagai konsultan wajib melayani dengan baik dan mendukung kepentingan klien sambil mempertahankan loyalitasnya ke perusahaan. Fokus utama audit internal adalah membantu satuan kerja operasional mengelola resiko dengan mengidentifikasi masalah dan menyarankan perbaikan yang memberi nilai tambah untuk memperkuat organisasi.

Menurut Sawyer (2003: 40-41) audit internal merupakan pihak yang pantas melaksanakan jasa ini karena dianggap memiliki pengalaman, keahlian investigasi, dan kemampuan analitis. Rekomendasi dari jasa auditor internal sebagai konsultan harus di

laporkan kepada manajemen sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, dan bahwa konsultasi merupakan jasa, pemberian saran, bukan bagian dari proses manajemen. Jasa konsultasi harus dapat menghasilkan nilai tambah bagi manajemen dan organisasi.

3. Peranan Auditor Internal Sebagai Katalis

Auditor internal dimungkinkan untuk memiliki peran sebagai katalisator yang akan ikut menentukan tujuan perusahaan. Peran ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengarahkan manajemen agar sesuai dengan program dan tujuan yang telah di buat oleh perusahaan. Pekerjaan auditor dalam melaksanakan perannya sebagai katalis berkaitan dengan pemberian jaminan kualitas dan berperan sebagai fasilitator serta agen perubahan di dalam suatu organisasi.

4. Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal

1. Fungsi Audit Internal

Fungsi audit internal yang di kemukakan oleh Kurniawan (2012:53) fungsi audit internal adalah memerikan berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk audit kinerja dan audit operasional yang akan dapat membantu manajemen senior dan dewan komisaris di dalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil di dalam organisasi sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independen mengenai seberapa baik organisasi.

Sedangkan fungsi audit internal menurut Standar Profesi Akuntansi Publik (SPAP) adalah sebagai berikut:

“fungsi audit internal dapat terdiri dari satu atau lebih individu yang melaksanakan aktivitas audit internal dalam suatu entitas. Mereka secara teratur memberikann informasi tentang fungsinya pengendalian, memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada evaluasi terhadap desain tentang kekuatan dan kelemahan dan rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian intern”.

Adapun fungsi Internal Auditing secara menyeluruh mengenai pelaksanaan kerja internal auditing dalam mencapai tujuannya adalah:

- a. Membahas dan menilai kebaikan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian akuntansi, keuangan serta operasi;
- b. Meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan, rencana dan prosedur yang di tetapkan;
- c. Meyakinkan apakah kekayaan perusahaan/organisasi dipertanggung jawabkan dengan baik dan dijaga dengan aman terhadap segala kemungkinan resiko kerugian;
- d. Meyakinkan tingkat kepercayaan akuntansi dan cara lainnya yang di kembangkan dalam organisasi;
- e. Menilai kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah di bebaskan;
- f. Membantu manajemen untuk mendapatkan administrasi perusahaan yang paling efisien dengan memuat kebijaksanaan operasi kerja perusahaan;

- g. Membantu kebenaran dari data keuangan yang di buat dan efektivitas dari proedur intern;
- h. Memberikan dan memperbaiki kerja yang tidak efisien;
- i. Membuat rekomendasi perubahan yang diperlukan dalam beberapa fase kerja;
- j. Menentukan sejauh mana perlindungan pencatatan dan pengamanan harta kekayaan perusahaan terhadap penyelewengan;
- k. Menentukan tingkat koordinasi dan kerja sama dari kebijaksanaan manajemen.

2. Tanggung Jawab Audit Internal.

Tanggung jawab audit internal ditulis oleh Hartadi (1991) dalam bukunya *Internal Auditing: Suatu Tinjauan Sistem Informasi Manajemen dan Cara Pelaporannya* yaitu:

- 1) Menilai prosedur dan menilai hal-hal yang saling berhubungan, terdiri dari:
 - a) Member pendapat efisiensi atau kelayakan prosedur
 - b) Mengembangkan atau memperbaiki prosedur
 - c) Menilai personalia
 - d) Ide-ide seperti pembuatan standar
- 2) Verifikasi dan analisis data, yang menyangkut:
 - a) Menelaah data yang di hasilkan sistem kuntansi guna membuktikan bahwa laporan-laporan yang dihasilkan adalah benar(*valid*)

- b) Membuat analisis-analisis lebih lanjut untuk member dasar/membantu penyimpulan-penyimpulannya.
- 3) Verifikasi kelayakan yaitu: prosedur akuntansi atau kebijakan lainnya yang telah di lakukan
 - a) Prosedur operasi/kegiatan yang mengikuti peraturan-peraturan pemerintah telah di laksanakan
 - b) Kewajiba-kewajiban yang bersangkutan dengan kontrak yang berjalan telah dipatuhi

5. Aktifitas Audit Internal

Aktivitas audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta dengan mendorong perbaikan pengendalian internal secara berkesinambungan. Faiz Zamzani, dkk (2018:24) 2130.A1- Aktivitas audit internal harus mengevaluasi kecukupan dan efektifitas pengendalian dalam merespons resiko didalam tata kelola, operasi dan sistem informasi organisasi, mengenai:

1. Pencapaian tujuan strategis organisasi
2. Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasi
3. Efektivitas dan efisiensi operasi
4. Pengamanan asset
5. Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur dan kontrak.

6. Tahap-Tahap Audit Internal

Proses audit internal pada prinsipnya merupakan serangkaian tahapan pelaksanaan audit yang dimulai sejak penerimaan penugasan sampai dengan terbitnya laporan hasil audit. Adapun tahapan-tahapan dari proses audit sebagaimana yang ditulis oleh Zamzami (2010) yang terdiri dari 6 tahapan yaitu sebagai berikut:

a) Persiapan Penugasan Audit

Persiapan penugasan audit adalah proses awal yang dilaksanakan pada proses audit. Dalam tahap ini dimulai dengan penunjukan tim yang akan terlibat dalam suatu penugasan oleh satuan audit intern. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tim yang akan melaksanakan tugas di suatu unit mempunyai payung hukum yang kuat bahwa tim tersebut melaksanakan audit atas perintah dari atasan dan bukan karena kehendak pribadi.

b) Survey Audit Pendahuluan

Survey pendahuluan merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai resiko dari suatu unit yang akan di periksa. Oleh karena itu survey pendahuluan disini meliputi langkah-langkah analisis terhadap risiko mikro yang terkait dalam suatu unit yang akan di audit.

c) Pelaksanaan Pengujian

Setelah melaksanakan survey pendahuluan, maka auditor dapat menentukan cakupan dan luas audit yang hendak di laksanakan pengujiannya. Pada tahap survey pendahuluan auditor baru mengumpulkan informasi-informasi awal tentang kondisi audit. Pada tahap pelaksanaan pengujian ini auditor perlu mencari bukti yang

akan menguatkan informasi yang diperoleh pada survey pendahuluan tersebut. Bukti audit yang cukup, kompeten, relevan, dan catatan lainnya. Bukti audit dapat menjadi bukti awal sebagai bukti hukum apabila bukti tersebut ditemukan secara cermat, akurat, dan tepat yang terkait dengan temuan audit atau kesimpulan audit.

d) Penyelesaian Penugasan Audit

Penyelesaian penugasan audit ini merupakan tahapan akhir dari proses pekerjaan lapangan. Dalam tahap ini auditor memantapkan berbagai temuan yang telah dirangkum selama proses pekerjaan lapangan. Disini auditor memperoleh keyakinan yang memadai bahwa temuan yang dirangkumnya telah dijalankan sesuai prosedur, obyektif, dan independen. Pada saat mengkonfirmasi temuan kepada audit, auditor telah menyiapkan berbagai data yang sekiranya dibutuhkan untuk mendukung temuan yang diajukan beserta rekomendasi yang disarankan kepada audit. Setelah proses diskusi selesai maka auditor meminta jawaban dalam bentuk tertulis beserta dengan kesanggupan audit untuk menindaklanjuti rekomendasi. Dalam hal tanggapan tertulis tersebut, audit juga mencantumkan batas tidak lanjut atas rekomendasi tersebut akan dilaksanakan serta personel yang bertanggung jawab. Tahapan akhir dari pertemuan lapangan adalah pertemuan akhir (*exit meeting*) yang di hadiri oleh seluruh tim yang terlibat beserta manajemen dari pihak audit terutama yang terkait langsung dengan temuan dan rekomendasi audit. Pada pertemuan akhir tim pemeriksa menyampaikan pokok-pokok hasil

pemeriksaan kepada pimpinan instansi/unit kerja yang diperiksa atau yang mewakili. Pada kesempatan ini auditor juga membicarakan tentang pemantauan pelaksanaan rekomendasi yang telah di sepakati.

e) Laporan hasil audit

ini merupakan media untuk menyampaikan permasalahan serta temuan berikut dengan rekomendasi yang terdapat dalam suatu unit kepada manajemen unit tersebut. Setelah selesai pelaksanaan pengujian di lapangan, maka berdasarkan dokumentasi kertas kerja audit (mulai dari pencatatan/persiapan audit sampai dengan temuan dan rekomendasi yang sudah mendapatkan tanggapan dari audit) ketua tim bersama anggota tim kemudian menyusun laporan hasil audit.

f) Pemantauan Tindak Lanjut

Tindak lanjut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh audit terkait dengan pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan.

7. Standar Profesional Audit Internal

Standar profesional auditor internal dibagi menjadi 4 (empat) oleh Hery (2010:73):

1. Independensi

Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang di periksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian

yang tidak memihak (netral). Hal ini hanya dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari para auditor internal. Status organisasi harus dapat memberikan keleluasan bagi auditor internal dalam menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan secara maksimal.

2. Kemampuan Professional

Kegiatan yang dilakukan oleh auditor internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian professional. Kemampuan professional wajib dimiliki oleh setiap auditor internal. Kemampuan professional sangat berguna bagi auditor internal agar dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. Kemampuan professional yang harus dimiliki oleh auditor internal terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Pengetahuan dan kemampuan

Kemampuan professional wajib dimiliki oleh auditor internal dalam setiap pemeriksaan, pimpinan audit internal haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi dan hukum yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

2) Pengawasan

Pimpinan auditor internal bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh para stafnya. Pengawasan yang dilakukan

sifatnya berkelanjutan, yang dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penyimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

3) Ketelitian profesional

Auditor internal harus dapat bekerja secara teliti dan melaksanakan pemeriksaan. Auditor internal harus mewaspadaai berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan, ketidak efektifan, pemborosan, dan konflik kepentingan

3. Lingkungan Pekerjaan

Dalam melakukan pekerjaannya auditor internal harus memperhatikan lingkup pekerjaannya yang meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi. Tujuan peninjauan ini adalah untuk menentukan apakah sistem yang telah ditetapkan dapat memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efisien dan ekonomis serta untuk memastikan apakah sistem tersebut telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil pemeriksaan, dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Tujuan dan prosedur pemeriksaan haruslah ditunjukkan pada berbagai resiko yang berhubungan dengan bidang yang akan diperiksa. Tujuan pemeriksaan ini merupakan hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemeriksaan. Tujuan dan

prosedur pemeriksaan secara bersama-sama akan menyatakan lingkup pekerjaan pemeriksaan internal.

8. Kecurangan (*Fraud*)

1) Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

The Institute of Internal Auditors (IIA) sebagai lembaga konsorsium audit internal secara internasional mendefinisikan *Fraud* sebagai setiap kegiatan ilegal yang ditandai dengan penipuan, pengelapan dan atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak bergantung apakah ancaman dilakukan secara fisik atau tidak. *Fraud* dilakukan oleh pihak-pihak maupun organisasi untuk memperoleh uang, property dan jasa, atau untuk menghindarkan pembayaran suatu jasa dan mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis suatu organisasi.

Menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 KUHP, pasal 268 KUHPerdara pengertian *Fraud* merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Dalam hukum pidana Kecurangan adalah kejahatan atau pelanggaran yang dengan sengaja menipu orang lain dengan maksud untuk merugikan mereka, biasanya untuk memiliki suatu harta benda atau jasa ataupun keuntungan dengan cara tidak adil atau curang.

Dari beberapa definisi *Fraud* diatas, maka tergambar bahwa yang dimaksud dengan kecurangan adalah sangat luas dan dapat dilihat pada beberapa kategori kecurangan. Namun, secara umum unsur-unsur dari kecurangan adalah: a) Harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*); b) Dari suatu masa lampau (*past*)

atau sekarang (*present*); c) Fakta bersifat material (*material fact*); d) Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*); e) Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi; f) Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*); g) Merugikan (*dertrimen*).

2) Tipe-Tipe Kecurangan

Berikut ini tipe-tipe kecurangan menurut Dewi Fitriyani dan Deni Arnos Kwary dalam bukunya yang berjudul Audit dan Assurance Teknologi Informasi, Edisi 2 menjelaskan bahwa auditor biasanya berhubungan dengan kecurangan pada dua tingkat yaitu kecurangan oleh karyawan dan kecurangan oleh pihak manajemen.

★ **1) Kecurangan oleh Karyawan (*employee fraud*)**, atau kecurangan oleh karyawan non manajemen, biasanya didesain untuk secara langsung mengoversi kas atau asset lainnya demi keuntungan pribadi karyawan terkait. Kecurangan oleh karyawan biasanya melibatkan penyalahgunaan asset, yang merupakan proses tiga tahap: (1) mencuri sesuatu yang bernilai (*asset*), (2) mengonversi asset tersebut kedalam bentuk yang dapat digunakannya (uang), dan (3) menutupi kejahatan tersebut untuk menghindari deteksi. Tahap ketiga sering kali adalah tahap yang paling sulit. Mungkin relative mudah bagi seorang staf administrasi bagian gudang untuk mncuri persediaan dari gudang perusahaan, tetapi mengubah *record* persediaan untuk menyembunyikan pencurian tersebut adalah suatu tantangan. Untuk melakukan kecurangan

semacam itu, karyawan tersebut harus mencari cara menghindari system pengendalian internal perusahaan. Jika perusahaan memiliki system pengendalian internal yang efektif, maka kecurangan oleh karyawan biasanya dapat di cegah atau di deteksi.

2) Kecurangan oleh pihak manajemen (*management fraud*) lebih tidak tampak dari pada kecurangan oleh karyawan, karena seringkali kecurangan seacam ini lolos dari deteksi sampai terjadinya kerusakan atau kerugian besar yang menyulitkan perusahaan. Biasanya kecurangann oleh pihak manajemen tidak melibatkan pencurian langsung asset. Pihak manajemen puncak dapat melakukan berbagai aktifitas curang untuk mendapatkan nilai saham yang lebih tinggi. Hal ini mungkin di lakukan untuk memenuhi harapan para investor atau untuk memanfaatkan opsi saham yang dimasukkan dalam paket kompensasi manajer terkait. Kecurangan ini juga disebut sebagai kecurangan kinerja (*performance fraud*), yang seringkali melibatkan praktik penipuan untuk menggelembungkan pendapatan atau untuk menunda pengakuan kebangkrutan atau penurunan pendapatan. Kecurangan manajemen pada tingkat yang lebih rendah biasanya melibatkan penyajian data keuangan atau laporan internal yang salah untuk mendapatkan kompensasi tambahan, mendapatkan promosi, atau untuk meloloskan diri dari penalty akibat buruknya kinerja.

3. Jenis-Jenis Kecurangan

ACFE mengklasifikasikan *Fraud* menjadi 3 kategori yaitu :

a) Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statemen Fraud*)

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salaj saji material lapora keuangan yang merugikan investor dan kreditor karena melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kecurangan ini dapat bersifat *Financial* atau Kecurangan *non financial*. Contoh kecurangan dalam laporan keuangan adalah praktek *window dressing* untuk menaikkan nilai aset organisasi.

b) Penyalagunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalagunaan aset dapat digolongkan ke dalam: kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang. Praktek kecurangan yang sering dilakukan adalah penyalahgunaan aset perusahaan untuk meraih keuntungan pribadi bagi anggota organisasi/perusahaan, dapat melibatkan tingkat staf sampai dengan manajemen puncak.

c) Korupsi (*Corruption*)

Korupsi terbagi kedalam pertentangan kepentingan (*conflict of interst*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extartion*). Praktek kecurangan ini umumnya terjadi pda saat pengadaan barang/jasa (*procurement*), yakni

terjadinya kolusi antara bagian pengadaan/panitia pengadaan dengan penyediaan barang/jasa.

Toeri lain yang menjelaskan mengenai penyebab *Fraud* dikembangkan oleh Balogna (1993), atau juga atau juga dikenal sebagai GONE Theory, terdiri dari 4 faktor yang mendorong seorang yang berperilaku menyimpang dalam hal ini perilaku *Fraud*. Keempat faktor tersebut adalah:

- (1) *Greed* atau keserakahan, berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada didalam diri setiap orang.
- (2) *Opportunity* atau kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.
- (3) *Needs* atau kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupny yang menurutnya wajar.
- (4) *Exposure* atau pengungkapan, berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

4. Faktor-faktr Penyebab Kecurangan

Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurngan, yang disebut juga dengan teori GONE yang di kemukakan oleh Jack Bologne (Rahadian: 2014) yaitu: (1) *Greed* (keserakahan), (2) *opportunity* (kesempatan), (3) *Need* (kebutuhan), (4) *Exposure* (pengungkapan).

Menurut SAS9 (AU 316) yang dikutip oleh Amin Wijaya Tunngal (2016:9) terdapat tiga faktor seseorang melakukan kecurangan yang dikenal sebagai “*fraud triangle*”.

Gambar 2.1

Segitiga Kecurangan (*Fraud Trigles*)



Sumber: Pua et al., (2017)

- a. Tekanan (*Pressure*): dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan yang dipicu oleh alasan ekonomi, emosional, atau nilai.
- b. Peluang (*Opportunity*): kondisi yang memberikan peluang pada seseorang untuk melakukan kecurangan. Misalnya lemahnya internal control atau penyalahgunaan wewenang.
- c. Rasionalisasi (*Razionalization*): pelaku mencari pembenaran sebelum melakukan kecurangan. Seseorang melakukan rasionalisasi agar dirinya dapat mencerna tindakannya yang

ilegal agar tetap dapat mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang terpercaya.

5. Pencegahan dan Pendeteksian, dan Penginvestigasian Kecuranga

Zamzami et al., (2018: 18) 1210.A2- Audit internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengevaluasi resiko kecurangan dan cara organisasi mengelolanya tetapi tidak diharapkan memiliki keahlian sebagaimana seorang yang tanggung jawab utamanya adalah audit teknologi informasi.

Walaupun auditor internal tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi namun auditor internal harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu membantu manajemen mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi terjadinya kecurangan, serta dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen. Fungsi audit internal harus secara efektif membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar, mengenai kegiatan yang diperiksa.

Sesuai Interpretasi Standar Profesional Audit (SPAI)- Standar 1210.2, tentang pengetahuan mengenai kecurangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi kecurangan. Selain itu, Statement On Internal Auditing Standards (SIAS) No.3, tentang Deterrence, Detection, Investigation, and Reporting of

Fraud (1985), memberikan pedoman bagi auditor internal tentang bagaimana melakukan pencegahan, pendeteksian, dan penginvestigasian terhadap fraud. SIAS No. 3 tersebut juga menegaskan tanggung jawab auditor internal untuk membuat laporan audit tentang fraud.

a) Peranan Audit Internal dalam Pencegahan Fraud

Salah satu pendekatan yang di pandang paling efektif untuk mencegah timbulnya fraud adalah peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal. Pihak yang paling bertanggung jawab atas pencegahan fraud adalah pihak manajemen dalam organisasi. Namun semua pihak dalam organisasi harus terlibat untuk mencegah terjadinya fraud, sehingga apabila terjadi fraud, dampak yang timbul dapat diminimalisir. Auditor internal bertanggung jawab untuk membantu pencegahan fraud dengan jalan melakukan pengujian (test) atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal, dengan mengevaluasi seberapa jauh resiko yang potensial (*potential risk*) telah diidentifikasi.

Dalam pelaksanaan audit kinerja (*performance audit*), audit keuangan (*financial audit*), maupun audit operasional (*operational audit*), auditor internal harus mengidentifikasi adanya gejala-gejala kecurangan (*fraud symptoms*) berupa *red flags*, maka auditor internal lebih mudah melakukan investigasi atas fraud tersebut.

b) Peranan Auditor Internal dalam Pendeteksian Fraud.

Deteksi *fraud* mencakup identifikasi indikator-indikator kecurangan (*fraud indicators*) yang memerlukan tindak lanjut auditor internal

untuk melakukan investigasi. Auditor internal mempunyai peran penting dalam membantu manajemen untuk mendeteksi dan melaporkan *fraud* yang terjadi di organisasi. Oleh karena itu, keberadaan audit internal dapat meningkatkan nilai tambah organisasi dengan meningkatkan pengendalian internal. Beberapa hal yang harus dimiliki oleh auditor internal agar pendeteksian *fraud* lebih lancar antara lain (IIA):

- (1) Memiliki keahlian (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*) yang memadai dalam mengidentifikasi indikator terjadinya *fraud*. Dalam hal ini indikator internal harus mengetahui secara mendalam mengenai motivasi seseorang dalam melakukan *fraud* termasuk penyebab *fraud*, jenis-jenis *fraud*, karakteristik *fraud*, modus operandi (teknik-teknik) *fraud* yang biasa terjadi.
- (2) Memiliki sikap kewapadaan yang tinggi terhadap kemungkinan kelemahan pengendalian intern dengan melakukan serangkaian pengujian untuk menemukan indikator terjadinya *fraud*. Apabila diperlukan dapat menggunakan alat bantu (*tool*) berupa ilmu akuntansi forensic (*forensic accounting*) untuk memperoleh bukti audit (*audit evidence*) yang kuat dan valid.
- (3) Memiliki keakuratan dan kecermatan (*accuracy*) dalam mengevaluasi indikator-indikator *fraud* tersebut.

c) Peranan Auditor Internal dalam Penginvestigasian Fraud

Peranan auditor internal dalam investigasi tidaklah kaku dan tidak tunggal. Menurut IIA, auditor internal dimungkinkan untuk memikul

tanggung jawab utama investigasi kecurangan. Selain itu, auditor internal dapat juga hanya bertindak sebagai penyedia sumber daya untuk investigasi, atau sebaliknya, dapat juga tidak dilibatkan dalam investigasi. Investigasi merupakan pelaksanaan prosedur lebih lanjut bagi auditor internal untuk mendapatkan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah *fraud* yang telah dapat diidentifikasi tersebut memang benar-benar terjadi.

Apabila auditor internal diberikan peran utama untuk bertanggung jawab dalam investigasi kecurangan, maka harus dipastikan bahwa tim auditor internal yang bertugas memiliki keahlian yang cukup mengenai skema-skema *fraud*, teknik *fraud*, teknik investigasi, ketentuan perundang-undangan, dan hukum yang berlaku, serta pengetahuan dan keahlian lain yang dibutuhkan dalam investigasi. Menurut SPAI (2004: 66-67), dalam melakukan investigasi, auditor internal diwajibkan :

- (1) Melakukan penilaian atau penelitian yang seksama atas kemungkinan terjadinya *fraud*
- (2) Meyakini baha pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk menangani investigasi ini secara kelompok memang dimiliki oleh auditor internal
- (3) Membuat suatu alur prosedur untuk mengidentifikasi: siapa yang terlibat (pelaku *fraud*), sejauh mana luasnya *fraud*, kapan dan dimana dilakukan serta bagaimana teknik *fraud* yang dipakai dan tentunya juga berapa potensi kerugian yang diderita akibat perbuatan *fraud* tadi.

(4) Dalam melakukan investigasi diharapkan auditor internal selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya bagian personalia, hukum, security dan lain sebagainya.

Untuk menjaga reputasi organisasi, pelaksanaan investigasi agar menunjang tinggi harkat dan martabat personil yang di investigasi.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, berikut dikemukakan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Hernaldy (2017)	Pengaruh Peranan Aditor Internal terhadap Pendeteksian dan pencegahan <i>Fraud</i> (Studi kasus pada PT. Aneka Tambang. Tbk)	Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan tambahan uji validitas dan uji reabilitas serta uji asumsi klasik.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan persial peranan auditor internal berpengaruh secara signifikan terhadap pendeteksian dan pencegahan fraud.
2.	Norsain (2014)	Peranan Audit Internal dalam Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan	Metode penelitian ini menggunakan studi kasus dengan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internal audt yang dilaksanakan pada PNPM Mandiri

		(<i>fraud</i>) (Studi kasus pada PNPM Mandiri Perkotaan Kecamatan Kaliangrt)	menggunakan data primer dan skunder sebagai sumber datanya	Perkotaan di Kecamatan Kaliangrt sudah cukup memadai dalam deteksi dan pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) dengan struktur pengendalian intern yang baik sebagai anti-fraud controls dan deteksi kecurangan di lakukan melalui prosedur-prosedur audit
3.	Festi T, Andreas dan Natasari (2014)	Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan	Penelitian ini menggunakan metode survey yang digunakan instrument kuesioner. Metode analisis itu sederhana metode linear regresi.	Hasil penelitian menunjukkan peran audit internal berpengaruh terhadap pencegahan penipuan. Ini berarti bahwa peran audit internal adalah lebih baik, sebagai hasil pencegahan <i>fraud</i> menjadi meningkat. Koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini adalah 0,47. Ini berarti bahwa 46,7% pencegahan penipuan di engaruhi oleh peran audit internal
4.	Widaningsih (2015)	Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Survey pada BUN yang berkantor pusat di Kota Bandung)	Metode yang digunakan dalam adalah metode deskriptif asosiatif	Hasil penelitian menunjukkan bsarnya pengaruh profesionalisme auditor intrnal terhadap pencegahan fraud adalah sebesar 40,07% dan sisanya sebesar 53,93% dapat di pengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Dan

				besarnya pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pendeteksian kecurangan adalah sebesar 37,33% sisanya sebesar 62,67 % dapat di pengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.
5.	Maliawan, Sujana dan Diatmika (2017)	Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Interen Terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Studi Empiris pada Bank Mandiri Kantor Cabang Area Denpasar)	Metode Pengupulan data yang dilakukan adalah dengan survey melalui pembagian Kuesioner kepada responden.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) audit internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (<i>Fraud</i>), (2) Efektivitas Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (<i>Fraud</i>), (3) audit internal dan efektivitas pengendalian intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (<i>Fraud</i>).
6.	Widilestarinin gistar, dan Akbar (2014)	Pengaruh audit Internal Terhadap Resiko Fraud (Survey pada PT. BRI di Wilayah Bandung)	Metode Penelitian menggunakan metode deskriptif dan verivikatif.	Hasil penelitian menunjukkan pengaruh koefisien korelasi antara audit internal terhadap resiko fraud sebesar 8.94%. Besar pengaruh audit nternal terhdap risiko fraud pada PT. BRI di Wilayah Bandung adalah 53.3%. sisanya 46.7% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti.

7.	Irdawanti, dan Uppun (2018)	Pengaruh Keahlian dan Independensi auditor dalam professional Judgement audit terhadap pendeteksian kecurangan dengan teknologi informasi sebagai variable moderasi	Penelitian ini menggunakan metode survey. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner kepada aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang bekerja pada Inspektorat Kalimantan Utara, Inspektorat Kabupaten Bulungan, Inspektorat Kota Tarakan, dan Inspektorat Kabupaten Nunukan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian dan independensi auditor, baik secara persial maupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Adapun teknologi informasi sebagai pemoderasi hanya mampu memperkuat keahlian auditor terhadap pendeteksian kecurangan, sebaliknya tidak mampu memperkuat Pngaruh independensi auditor terhadap pendeteksian kecurangan. Disimpulkan bahwa keahlian dan independensi auditor sangat berpengaruh dalam pendeteksian kecurangan, sementara teknologi informasi haanya mampu memoderisasi hubungan keahlian auditor terhadap pendeteksian keurngan
8.	Pua, Sondakh, dan Pangerapan (2017)	Evaluasi Fungsi Auditor Internal dalam Mendeteksi dan Mencegah Fraud pada PDAM Airmadidi.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggambar	Hasil penelitian menunjukkan bhwa fugsi auditor internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan pda PDAM Airmadidi bahwa fungsi uditor

			kan fungsi auditor internal melalui uraian tugas dan program auditor internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan.	internal berjalan dengan baik dapat dilihat dari tugas auditor internal : meakukan pemeriksaan, baik audit rutin atau audit khusus diman terdapat penilaian pada system control, pengawasan, inpeksi dan memberikan saran untuk perbaikan dalam perusahaan.
9.	Meikhati, dan Rahayu (2015)	Peranan Audit Internal dan Pencegahan Fraud dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal (Studi Kasus pada Yayasan Internusa Surakrt)	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Sampe yang digunakan dalam peneitian ini terdiri dari 37 responden yang erddii dari 4 manajer yayasan, 3 staf yayasan, 30 dosen/staff APIKES dan AKBID Citra Medika,	Hsil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran audit internal mempengaruhi efektivitas pengendalian intern, (2) pencegahan kecurangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal, dan (3) peran audit interni dan penceegahan keurangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal. Peran yang dimainkan oleh audit internal dan pencegahan peipuan berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas pengendalian internal sebesar 71.2% dan sisanya 28.8% dipengaruhi oleh

				faktor-faktor lain yang tidak diteliti.
10.	Andriyanti, dan Latrini (2019)	Pengaruh Pengalaman, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal dalam Mencegah Kecurangan pada Bank Perkreditan Rakyat	Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah metode sensus dengan instrument kuesioner. Hasil dari kuesioner penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert. Metode Statistik yang digunakan yaitu analisis regresi linear berhand.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman, independensi dan profesionalisme auditor internal berpengaruh positif dalam mencegah kecurangan di Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung. Hal tersebut berarti semakin baik pengalaman, sikap independensi, dan sikap profesionalisme semakin baik upaya yang dilakukan dalam mencegah kecurangan di Bank Perkreditan Rakyat (BRI) Kab. Bandung.

C. Kerangka Pikir

Audit internal sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencegah kecurangan dalam suatu organisasi yang kegiatannya meliputi pengujian dan penilaian efektivitas serta kecukupan sistem pengendalian internal organisasi. Fungsi audit internal dapat berupa layanan informasi, sistem atau proyek. Tanpa audit internal, kepala instansi tidak akan memiliki sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja dalam organisasi.

Gambar 2.2**Kerangka Berpikir**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa atau kata-kata. *Qualitative research is an unconstrained approach to studying phenomena* (Libarkin C. Julie dan Kurdziel P. Josepha, 2002 dalam Fitrah dan Luthfiyah, 2017)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, dimana Inspektorat Daerah Kota Makassar dijadikan sebagai objek penelitian yang beralamat di Jl. Teduh Bersinar komp. Griya Fajar Mas. Penelitian ini dimulai bulan Juni-Juli 2019.

C. Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dengan objek penelitian pada Inspektorat Daerah Kota Makassar untuk memperoleh data ini dilakukan penelitian secara langsung.
- b. Data sekunder, adalah data dengan jalan mengumpulkan teori-teori sumber lain berupa informasi terutama menyangkut peran audit internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan pustaka dari berbagai literatur, karya ilmiah, buku-buku yang menyatakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

a. Teknik Dokumentasi (*Documentation Research*)

Teknik ini digunakan dalam pengumpulan data primer. Dengan teknik ini, peneliti mengumpulkan data mengenai hal bersangkutan dengan objek penelitian.

b. Teknik Wawancara (*Interview Research*)

Teknik ini digunakan dalam melakukan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu interview yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang akan di wawancarai selaku memberikan jawaban atau informasi atas pertanyaan yang di ajukan. Teknik wawancara yang di lakukan bersifat bebas yaitu dengan cara tanya jawab peneliti dengan pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

c. Kuesioner

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner terbuka, yaitu kuesioner yang di

sajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberi isian sesuai kehendak dan keadaanya.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan langkah-langkah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui peranan auditor internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan pada Pemerintah Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan terbuka dan tertutup. Daftar pertanyaan terbuka dimaksudkan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai peran auditor internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan pada Pemerintah Kota Makassar. Daftar pertanyaan terbuka ini lebih ditunjukkan kepada auditor internal, dalam kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan oleh auditor internal Inspektorat Daerah Kota Makassar, sedangkan daftar pertanyaan tertutup ditujukan oleh auditor internal.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian terletak pada kegiatan auditor internal
- 2) Mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan daftar pertanyaan terbuka, dan menyebar kuesioner dengan daftar pertanyaan tertutup kepada auditor internal kredit.

- 3) Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis dan dilakukan pengujian dengan proporsi yang telah dibuat oleh penguji, sebagai berikut:

Tabel 3.1. Pedoman Efektifitas peranan audit internal dalam mendeteksi dan mencegah *fraud*

No.	Kelas Interval	Keterangan
1	0%- 25%	Auditor internal tidak berperan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan
2	26%-50%	Auditor internal kurang berperan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan
3	51%- 75%	Auditor internal cukup berperan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan
4	76%-100%	Auditor internal sangat berperan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan

Sumber : Nugraheni dan Mustikawati (2016)

- a. Jawaban “Ya” atas pertanyaan tertutup menunjukkan: Auditor internal berperan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan.
- b. Jawaban “Tidak” atas pertanyaan tertutup menunjukkan: Auditor internal tidak berperan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan.
- c. Jawaban “Ya” kemudian dijumlahkan dan dibuat persentase dengan jumlah pertanyaan. Perhitungan kuesioner menggunakan rumus Dean J. Champion sebagai berikut :

$$\text{Presentase} = \frac{\sum \text{Jawaban "Ya"}}{\sum \text{Jumlah Jawaban Kuesioner}} \times 100\%$$



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Inspektorat Daerah Kota Makassar

Sejak terbentuknya inspektorat wilayah datu iiujung pandang sudah ada pegawai yang di angkat khusus oleh menteri dalam negeri yang disebut pegawai “dipekerjakan”, dan sebelum berlakunya otonomi daerah terdapat 3 jenis pegawai yang ditempatkan yaitu pegawai daerah, pegawai pusat diperbantukan (DPB) dan pegawai pusat dipekerjakan (DPK).

Inspektorat wilayah datu ii ujung pandang pada awal berdirinya dipimpin oleh seorang kepala untuk pertama kalinya dipimpin oleh bapak Drs. H. Umar Gazali yakni tahun 1979-1981. Kemudian digantikan oleh bapak Drs. H. Andi Mappaewang. Beliau menjabat selama dua tahun yakni sampai tahun 1981-1982.

Pada tahun 1982-1985 kepala inspektorat wilayah datu ii ujung pandang dijabat oleh bapak Drs. H. Andi Ampa Uleng. Tahun 1985-1989 inspektorat wilayah kodya datu ii ujung pandang dipimpin oleh Bapak Drs. Basuki Iskandar. Selanjutnya dalam tahun 1989-1995 inspektorat wilayah kodya datu ii ujung pandang dipimpin oleh Bapak Drs. H. BR. Idrus Sitaba.

Masa selanjutnya, inspektorat wilayah datu ii ujung pandang dipimpin oleh Drs. Muh. Husni Madjid sampai dengan tahun 1997. Kemudian di tahun 1997-2000 jabatan kepala inspektorat digantikan oleh bapak Drs. Tandeng Tugi dengan masa jabatan selama kurang lebih empat

tahun yang selanjutnya ditahun 2000. Inspektur wilayah dati II Ujung Pandang di jabat oleh bapak Drs. Alimuddin Wellang sampai dengan tahun 2002. Periode selanjutnya dipimpin oleh bapak H. Andi Baso Bachtiar sampai dengan tahun 2005. Setelah itu inspektorat wilayah kodya dati II berubah nomenklatur menjadi badan pengawas daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah kota Makassar nomor 15 tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan/kantor daerah kota Makassar. Pada saat perda nomor 17 tahun 2005 tersebut diberlakukan, kepemimpinan pada inspektorat kota Makassar selanjutnya dengan sebutan inspektur dijabat oleh Bapak Drs. H. Hamsiar, M.Si. hingga bulan desember tahun 2013.

Kepemimpinan sebagai inspektur Kota Makassar selanjutnya yakni tahun 2014 atau selama 1 tahun dijabat oleh bapak Drs. Muslim yang kemudian dilanjutkan oleh bapak Drs. Zainal Ibrahim, M.Si dan sampai saat ini (Juli 2018) yang sebelumnya juga bertugas sebagai inspektur pembantu pada inspektorat kota Makassar.

2. Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui pengawasan yang efektif dan professional.

b. Misi

Terwujudnya pengawasan internal pemerintahan kota Makassar yang efektif.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi memegang peranan yang sangat penting. karena menyangkut tugas dan tanggung jawab para pegawai yang ada didalamnya. Struktur Organisasi dibuat agar maksud dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik karena adanya struktur organisasi terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Pengorganisasian merupakan suatu proses yang dimaksud untuk menciptakan kerja sama dan hubungan yang harmonis antara bagian-bagian dalam suatu organisasi. Bagian-bagian yang dimaksud itu adalah orang-orang yang melaksanakan pekerjaan, alat yang digunakan serta metode yang digunakan dalam pengorganisasian. Bagian-bagian tersebut tergambar dalam struktur organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, Inspektorat Daerah Kota Makassar adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota Makassar dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

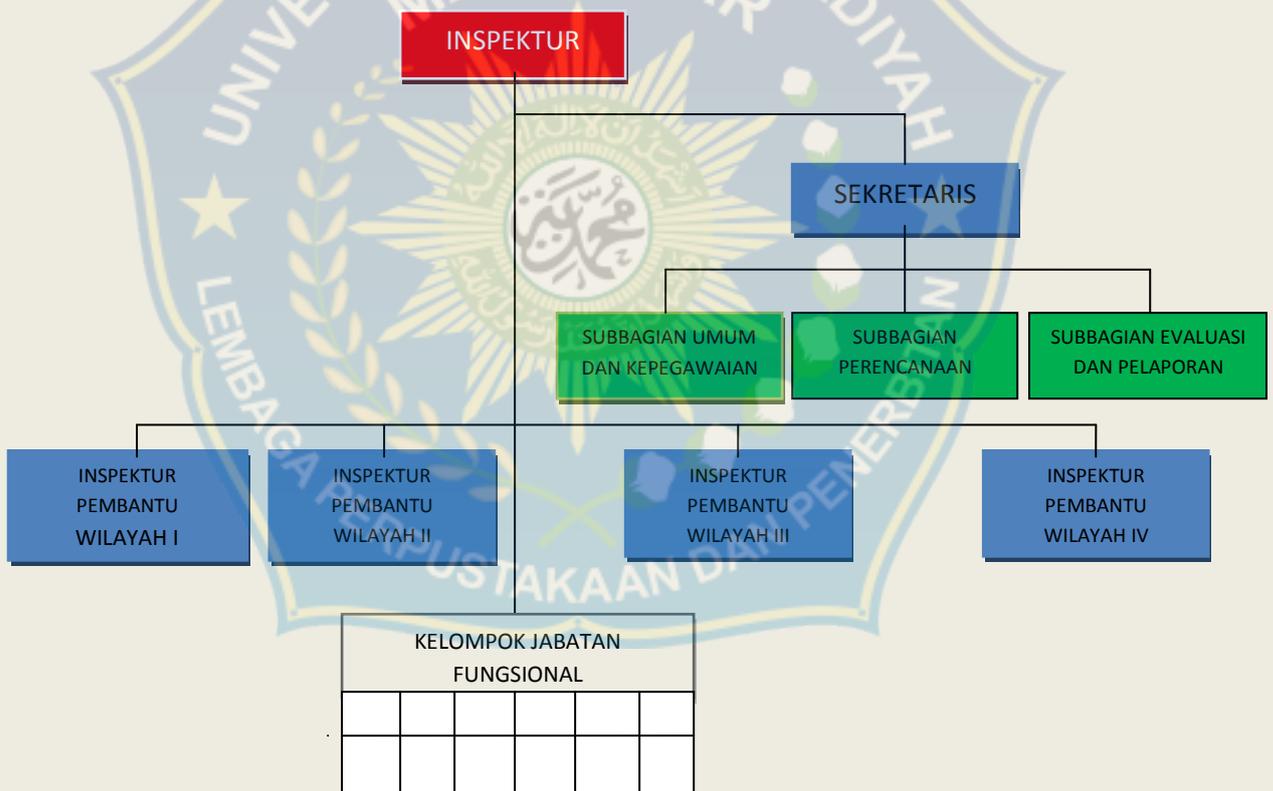
Susunan organisasi Inspektorat menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 terdiri atas:

1. Inspektur
2. Sekretaris, terdiri atas:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan

c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun gambar struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Makassar adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1

Struktur Organisasi

4. Uraian Pekerjaan

a. Inspektur

Inspektur kota Makassar mempunyai tugas pokok membantu wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kota

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu memberikan pelayanan teknis administrative dan fungsional kepada semua satuan organisasi dalam lingkup inspektorat di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada inspektur.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, melaksanakan urusan ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian, mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan.

d. Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

e. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan

administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

f. Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur wilayah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan koordinasi di bidang pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Deskripsi Data Responden

Dalam penelitian ini, responden adalah orang-rang yang mengetahui lebih mendalam mengenai peran auditor internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan pada pemerintah kota Makassar. Oleh Karena itu, peneliti telah menentukan responden dalam penelitian ini, yaitu pihak-pihak auditor internal pada inspektorat daerah kota Makassar. Adapun kuesioner yang disebarakan berjumlah 23 dan yang di kembalikan sejumlah 13.

1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Pengelompokan data berdasarkan jenis kelamin, bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah responden laki-laki dan perempuan yang digunakan dalam peneelitan, data responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.4.1.

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
Pria	3	23 %
Wanita	10	77%
Total	13	100 %

Sumber: Kuesioner Penelitian, diolah 2019

Berdasarkan Tabel. 4.1 Dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah wanita yang berjumlah 10 orang atau sebesar 77% dan responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 3 orang atau sebesar 23% dari total responden di Inspektorat Daerah Kota Makassar.

2. Responden Berdasarkan Usia

Tabel.4.2

Data Responden Berdasarkan Usia

Usia Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
≤ 25	1	7.7 %
26-30	0	0 %
31-35	5	38.4 %
36-40	4	30.8 %
≥41	3	23.1 %
Total	13	100 %

Sumber: Kuesioner Penelitian, diolah 2019

Berdasarkan tabel.4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia ≤ 25 tahun berjumlah 1 orang atau sebanyak 7.7%, tidak ada responden yang berusia 26-30 tahun, usia 31-35 tahun berjumlah 5 orang atau 38.4%, usia 36-40 tahun berjumlah 4 orang atau 30.8%, usia ≥ 41 tahun berjumlah 3 orang atau 23.1%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31-35 tahun yang merupakan tim auditor Internal pada Inspektorat Daerah Kota Makassar.

3. Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.4.3

Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase (%)
D3	1	7.7 %
S1	11	84.6 %
S2	1	7.7 %
S3	0	0 %
Total	13	100 %

Sumber: Kuesioner Penelitian, diolah 2019

Berdasarkan tabel.4.3 Dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan terakhir D3 sebanyak 1 orang atau 7.7%, S1 sebanyak 11 orang atau 84.6%, S2 sebanyak 1 orang atau 7.7%, dan tidak ada responden dengan pendidikan terakhir S3. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa mayoritas pendidikan terakhir responden pada Inspektorat Daerah Kota Makassar adalah S1.

4. Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.4.4

Data Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja (Tahun)	Jumlah Responden	Persentase (%)
≤ 1	1	7.7 %
1-3	0	0 %
4-5	1	7.7 %
≥ 5	11	84.6 %
Total	13	100 %

Sumber: Kuesioner Penelitian, diolah 2019

Berdasarkan tabel.4.4 Dapat diketahui bahwa responden dengan lama bekerja ≤ 1 tahun sebanyak 1 orang atau 7.7%, tidak ada responden dengan lama bekerja 1-3 tahun, responden dengan lama bekerja 4-5 tahun sebanyak 1 orang atau 7.7%, responden dengan lama bekerja ≥ 5 tahun sebanyak 11 orang atau 84.6%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden bekerja diatas 5 tahun.

5. Responden berdasarkan Jabatan

Untuk mengetahui karakteristik Responden berdasarkan jabatan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel. 4.5
Data Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Responden	Persentase (%)
Auditor Pertama	2	15.3%
Auditor Muda	8	61.6%
Auditor Madya	3	23.1%
Total	13	100 %

Sumber : Kuesioner Penelitian, diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden dengan Jabatan Auditor Pertama sebanyak 2 orang atau 15.3%, responden dengan Jabatan Auditor Muda sebanyak 8 orang atau 61.6%, responden dengan Jabatan Auditor Madya sebanyak 3 orang atau 23.1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah Auditor Muda.

C. Analisis Hasil Kuesioner

1. Peranan Auditor Internal

Peranan auditor internal dikelompokkan pada pertanyaan nomor 1-14 pada kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan positif, dimana pilihan "YA" akan menunjukkan bahwa responden melihat sangat pentingnya peran auditor internal dalam melakukan pekerjaannya. Indikator peneliti untuk peranan auditor internal pada inspektorat di bagi menjadi 4 indikator yaitu: indikator Independensi, Indikator Kemampuan Profesional, Indikator Lingkup Pekerjaan, dan Indikator Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan. Dalam penelitian ini diperoleh data untuk peran

auditor internal, kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus Dean J Champion sebagai berikut berikut:

$$\text{Presentase} = \frac{\sum \text{Jawaban "Ya"}}{\sum \text{Jumlah jawaban kuesioner}} \times 100\%$$

a. Independensi

Tabel.4.6 Hubungan Auditor Internal dengan unit yang diaudit hanya berlaku saat diaudit, bukan sebagai mitra.

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	7	54%
Tidak	6	46%

Sumber : Kuesioner Independensi no 1

Berdasarkan hasil analisis jawaban kuesioner diperoleh hasil sebagai berikut: jumlah kuesioner yang dikembalikan sebanyak 13 dan jumlah jawaban "Ya" sebanyak 7 atau 54% ($7:13 \times 100$) dan total jawaban "Tidak" sebanyak 6 atau 46% ($6:13 \times 100$). Ini dapat disimpulkan bahwa hubungan auditor internal dengan unit yang diaudit hanya pada saat dilakukan audit, bukan sebagai mitra sudah berjalan efektif, meskipun masih ada hubungan kemitraan dengan unit-unit yang diaudit.

Tabel 4.7 Auditor internal memeriksa kegiatan dimana mereka memiliki kewenangan/ tanggung jawab didalamnya.

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	13	100%
Tidak	0	0

Sumber : Kuesioner Independensi no 2

Berdasarkan jawaban responden, jumlah kuesioner yang dikembalikan sebanyak 13 dan jawaban “Ya” sebanyak 13 atau 100% ($13;13 \times 100$). Ini berarti bahwa dalam menjalankan tugasnya auditor internal telah memeriksa kegiatan dimana mereka memiliki kewenang atau tanggung jawab didalamnya. Sehingga setiap auditor bekerja sesuai dengan bagian serta tugas dan tanggung jawabnya.

Table 4.8 Hasil pekerjaan auditor internal ditinjau dahulu sebelum laporan pekerjaan dikeluarkan

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	12	92.3%
Tidak	1	7.7%

Sumber : kuesioner Independensi no 3

Berdasarkan jawaban responden, jumlah kuesioner dengan jawaban “ya” sebesar 12 atau 92.3% ($12:13 \times 100$) ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya auditor internal ditinjau dahulu sebelum laporan pekerjaan dikeluarkan, dengan tujuan bahwa pekerjaan auditor internal telah terlaksana secara objektif.

Table. 4.9 auditor internal bertanggung jawab kepada unit audit internal

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	11	85%
Tidak	2	15%

Sumber : kuesioner independensi no 4

Berdasarkan jawaban kuesioner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 11 atau 85% ($11:13 \times 100$) dan jawaban “Tidak” sebanyak 2 atau

15%(2:13x100). Ini menunjukkan bahwa auditor internal sudah sangat bertanggung jawab kepada unit audit internal.

Table .4.10 auditor internal tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pimpinan atau staf objek yang diaudit

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	8	61.5%
Tidak	5	38.5%

Sumber : kuesioner independensi no 5

Berdasarkan jawaban kuesioner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 8 atau 61.5% (8:13x100) dan jawaban “Tidak” sebanyak 5 atau 38.5% (5:13x100). Ini menunjukkan bahwa auditor internal inspektorat masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pimpinan atau staf objek yang diaudit.

Table 4.11 auditor internal dengan objek yang diaudit sering terjadi konflik

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	6	46%
Tidak	7	54%

Sumber : kuesioner independensi no 6

Berdasarkan jawaban kuesioner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 6 atau 46% (6:13x100) dan jawaban “Tidak” sebanyak 7 atau 54% (7 :13x100). Ini menunjukkan bahwa auditor internal inspektorat terkadang memiliki konflik dengan objek yang diaudit pada saat pengungkapan yang benar mengenai permasalahan dan temuan-temuan hasil udit,

b. Kemampuan Profesional

Table 4.12 staf auditor internl mendapat sanksi jika pekerjaan tidak sesuai dengan standar profesi yang berlaku

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	12	92.3%
Tidak	1	7.7%

Sumber : kuesioner kemampuan professional no 7

Berdasarkan jawaban kuesionner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 12 atau 92.3% ($12:13 \times 100$) dan jawaban “Tidak” sebanyak 1 atau 7.7% ($1:13 \times 100$). Ini menunjukkan bahwa auditor internal akan mendapatkan sanksi jika pkerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Table 4.13 auditor internal memiliki pegawai yang berkualifikasi dalam berbagai disipin ilmu

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	9	69%
Tidak	4	31%

Sumber ; kuesioner kemampuan professional no 8

Berdasarkan jawaban kuesionner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 9 atau 69% ($9:13 \times 100$) dan jawaban “Tidak” sebanyak 4 atau 31% ($4:13 \times 100$). Ini menunjukkan bahwa auditor internal inspektorat tidak mesti memiliki pegawai yang berkualifikasi dalam berbagai disipin ilmu untuk melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan

Tabel 4.14 auditor internal telah lulus dalam menjalani pelatihan bidang audit internal lewat masa pendidikan.

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	13	100%
Tidak	0	0

Sumber : kuesioner kemampuan professional no 9

Berdasarkan jawaban kuesioner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 13 atau 100% ($13:13 \times 100$). Ini menunjukkan bahwa setiap staf auditor internal telah lulus dan menjalani pelatihan bidang audit internal lewat masa pendidikan.

c. Lingkup Pekerjaan

Tabel. 4.15 dalam menentukan keandalan informasi, pihak auditor internal melakukan pengawasan yang efektif

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	12	92.3%
Tidak	1	7.7%

Sumber : kuesioner lingkup pekerjaan no 10

Berdasarkan jawaban kuesioner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 12 atau 92.3% ($12:13 \times 100$) dan jawaban “Tidak” sebanyak 1 atau 7.7% ($1:13 \times 100$). Ini menunjukkan bahwa auditor internal inspektorat dalam keandalan informasi, pihak auditor internal juga melakukan pengawasan yang efektif termasuk penyimangan pencatatan dan pelaporan.

Table 4.16 auditor internal memastikan bahwa system yang ditetapkan SKPD sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan yang direncanakan.

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	12	92.3%
Tidak	1	7.7%

Sumber : kuesioner lingkup pekerjaan no 11

Berdasarkan jawaban kuesioner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 12 atau 92.3% ($12:13 \times 100$) dan jawaban “Tidak” sebanyak 1 atau 7.7% ($1:13 \times 100$). Ini menunjukkan bahwa auditor internal inspektorat dalam melaksanakan pekerjaannya, auditor internal bertugas memastikan bahwa sistem yang ditetapkan oleh unit/SKPD telah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana dan prosedur yang diterapkan

d. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

Table. 4.17 Auditor internal harus memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang diperiksa

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	12	92.3%
Tidak	1	7.7%

Sumber : kuesioner kegiatan pemeriksaan no 12

Berdasarkan jawaban kuesioner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 12 atau 92.3% ($12:13 \times 100$) dan jawaban “Tidak” sebanyak 1 atau 7.7% ($1:13 \times 100$). Ini menunjukkan bahwa auditor internal inspektorat sebelum melakukan audit harus memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang diperiksa guna untuk pembuatan perencanaan pemeriksaan.

Table. 4.18 Auditor internal mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi dengan pihak manajemen sebelum mengeluarkan laporan akhir

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	11	8%
Tidak	2	15%

Sumber : kuesioner kegiatan pemeriksaan no 13

Berdasarkan jawaban kuesioner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 11 atau 85% ($11:13 \times 100$) dan jawaban “Tidak” sebanyak 2 atau 15% ($2:13 \times 100$). Ini menunjukkan bahwa auditor internal sebelum melakukan laporan akhir harus mendiskusikan dengan pihak manajemen.

Table : 4.19 auditor internal melakukan monitor terhadap tindak lanjut untuk memastikan pihak manajemen telah melakukan tindakan yang tepat.

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	12	92.3%
Tidak	1	7.7%

Sumber : kuesioner kegiatan pemeriksaan no 14

Berdasarkan jawaban kuesioner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 12 atau 92.3% ($12:13 \times 100$) dan jawaban “Tidak” sebanyak 1 atau 7.7% ($1:13 \times 100$). Ini menunjukkan bahwa auditor internal setelah melakukan temuan audit, maka staf auditor internal sangat perlu melakukan tindakan yang tepat terhadap temuan audit yang dilaporkan.

2. Pendeteksian Kecurangan

Table 4.20 audit internal sudah melakukan identifikasi resiko terjadinya kecurangan pada unit/SKPD yang di audit

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	9	69%
Tidak	4	31%

Sumber : Kuesioner pendeteksian kecurangan no 1

Berdasarkan jawaban kuesioner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 9 atau 69% ($9:13 \times 100$) dan jawaban “Tidak” sebanyak 4 atau 31% ($4:13 \times 100$). Ini menunjukkan bahwa auditor internal inspektorat belum

sepenuhnya melakukan identifikasi kecurangan pada setiap iunit/SKPD yang di audit di kota Makassar karena belum ada register resiko.

Tabel 4.21 auditor internal sudah melakukan pengawasan terhadap resiko kecurangan di lapangan

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	12	92.3%
Tidak	1	7.7%

Sumber : kuesioner pendeteksian kecurangan no 2

Berdasarkan jawaban kuesioner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 12 atau 92.3% ($12:13 \times 100$) dan jawaban “Tidak” sebanyak 1 atau 7.7% ($1:13 \times 100$). jawaban “Ya” tersebut menunjukkan bahwa auditor internal sudah melakukan pengawasan resiko kecurangan yang terjadi dilapangan, tetapi terdapat 1 atau 7.7% jawaban tidak yang menyatakan bahwa pengawasan tersebut tidak dilakukan saat pelaksanaan.

Table 4.22 audit internal telah melakukan verifikasi transaksi dan analisis data untuk mengetahui kemungkinan terjadi kecurangan pada SKPD

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	13	100%
Tidak	0	0%

Sumber : kuesioner pendeteksian kecurangan no 3

Berdasarkan jawaban responden, jumlah kuesioner yang dikembalikan sebanyak 13 dan jawaban “Ya” sebanyak 13 atau 100% ($13:13 \times 100$). Ini berarti bahwa untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kecurangan pada SKPD maka harus melakukan verifikasi transaksi dan analisis data pada setiap instansi yang di periksa.

Table 4.23 auditor internal menerapkan prosedur pendeteksian yang memadai

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	12	92.3%
Tidak	1	7.7%

Sumber : kuesioner pendeteksian kecurangan no 4

Berdasarkan jawaban kuesioner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 12 atau 92.3% ($12:13 \times 100$) dan jawaban “Tidak” sebanyak 1 atau 7.7% ($1:13 \times 100$). Ini menunjukkan bahwa inspektorat daerah kota Makassar telah menerapkan prosedur pendeteksi kecurangan secara memadai.

Table 4.24 Pihak manajemen sudah membuka media audit untuk menerima masukan atau pengaduan tindakan kecurangan

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	8	54%
Tidak	5	46%

Sumber : kuesioner pendeteksian kecurangan no 5

Berdasarkan jawaban kuesioner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 8 atau 61.5% ($8:13 \times 100$) dan jawaban “Tidak” sebanyak 5 atau 38.5% ($5:13 \times 100$). Ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari jawaban “Ya” inspektorat kota Makassar 54% sudah membuka media audit untuk menerima masukan atau pengaduan tindakan kecurangan yang mungkin saja terjadi, tetapi terdapat 46% jawaban “tidak” yang menunjukkan bahwa inspektorat juga belum mempunyai media audit untuk menerima masukan atau pengaduan tindakan kecurangan.

3. Pencegahan Kecurangan

Table. 4.25 audit internal sudah menetapkan anti fraud

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	8	61.5%
Tidak	5	38.5%

Sumber : kuesioner pencegahan kecurangan no 1

Berdasarkan jawaban kuesioner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 8 atau 61.5% ($8:13 \times 100$) dan jawaban “Tidak” sebanyak 5 atau 38.5% ($5:13 \times 100$). Ini menunjukkan bahwa auditor internal inspektorat kota makassar belum menetapkan anti fraud secara memadai.

Table. 4.26 auditor internal sudah melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua aspek yang mungkin terjadinya kecurangan

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	9	69%
Tidak	4	31%

Sumber : kuesioner pencegahan kecurangan no 2

Berdasarkan jawaban kuesioner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 9 atau 69% ($9:13 \times 100$) dan jawaban “Tidak” sebanyak 4 atau 31% ($4:13 \times 100$). Ini menunjukkan bahwa auditor internal inspektorat sudah melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua aspek untuk memungkinkan tidak terjadinya kecurangan, akan tetapi disisi lain inspektorat tidak sepenuhnya untuk mencegah terjadinya kecurangan tetapi pada setiap unit/SKPD juga harus memperkuat pengawasan yang melekat pada pimpinan teratas dan SPI harus kuat. Pada setiap SKPD bisa mengurangi tingkat kecurangan.

Table. 4.27 sistem pengendalian yang memadai untuk mencegah terjadinya kecurangan

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	11	%
Tidak	2	%

Sumber : kuesioner pencegahan kecurangan no 3

Berdasarkan jawaban kuesioner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 11 atau 85% ($11:13 \times 100$) dan jawaban “Tidak” sebanyak 2 atau 15% ($2:13 \times 100$). Ini menunjukkan bahwa auditor internal inspektorat telah melaksanakan system pengendalian internal yang memadai untuk mencegah terjadinya kecurangan walaupun belum maksimal.

Table. 4.28 Pemisahan yang jelas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing unit

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	13	100%
Tidak	0	0%

Sumber : kuesioner pendeteksian kecurangan no 4

Berdasarkan jawaban responden, jumlah kuesioner yang dikembalikan sebanyak 13 dan jawaban “Ya” sebanyak 13 atau 100% ($13:13 \times 100$). Ini berarti bahwa terdapat pemisahan yang jelas pada setiap unit dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

Table. 4.29 media yang digunakan untuk menampung informasi yang berkaitan dengan kecurangan

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	7	54%
Tidak	6	46%

Sumber : kuesioner pencegahan kecurangan no 5

Berdasarkan hasil analisis jawaban kuesioner diperoleh hasil sebagai berikut: jumlah kuesioner yang dikembalikan sebanyak 13 dan jumlah jawaban “Ya” sebanyak 7 atau 54% ($7:13 \times 100$) dan total jawaban “Tidak” sebanyak 6 atau 46% ($6:13 \times 100$). Ini dapat disimpulkan bahwa sudah ada media yang digunakan untuk menampung informasi yang berkaitan dengan kecurangan meskipun belum efektif.

Table. 4.30 Tim khusus yang dibentuk untuk mencegah terjadinya kecurangan

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	7	54%
Tidak	6	46%

Sumber : kuesioner pencegahan kecurangan no 6

Berdasarkan hasil analisis jawaban kuesioner diperoleh hasil sebagai berikut: jumlah kuesioner yang dikembalikan sebanyak 13 dan jumlah jawaban “Ya” sebanyak 7 atau 54% ($7:13 \times 100$) dan total jawaban “Tidak” sebanyak 6 atau 46% ($6:13 \times 100$). Ini dapat disimpulkan bahwa adanya tim khusus yang dibentuk oleh inspektorat kota Makassar untuk mencegah terjadinya kecurangan tetapi belum maksimal. salah satunya adalah masih kurangnya tim audit.

Tabel. 4.31 Tindak lanjut yang cepat atas temuan kecurangan

Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	12	92.3%
Tidak	1	7.7%

Sumber : kuesioner pencegahan kecurangan no 7

Berdasarkan jawaban kuesioner, jumlah jawaban “Ya” sebanyak 12 atau 92.3% ($12:13 \times 100$) dan jawaban “Tidak” sebanyak 1 atau 7.7% ($1:13 \times 100$). Ini menunjukkan bahwa inspektorat daerah kota Makassar segera melakukan tindak lanjut dengan cepat ketika adanya temuan-temuan kecurangan pada setiap instansi/SKPD.

D. Pembahasan

1. Peranan Auditor Internal Inspektorat

Peranan auditor internal diukur menggunakan 14 (empat belas) jawaban responden. Tabel Peranan Auditor Internal dapat dilihat berikut ini:

Tabel. 4.32 Rekapitulasi Jawaban Peranan Auditor Internal

Peran Auditor Internal	Total Jawaban Ya	Persentase (%)	Total Jawaban Tidak	Persentase (%)	Total Pertanyaan
Independensi	57	73%	21	27%	78
Kemampuan Profesional	34	87.2%	5	12.8%	39
Lingkup Pekerjaan	24	92.3%	2	7.7%	26
Kegiatan Pemeriksaan	35	89.7%	4	10.3%	39
Total	150		32		182

Sumber: Kuesioner Penelitian

$$\text{Presentase} = \frac{150}{182} \times 100 = 82.4\%$$

Berdasarkan hasil analisis skor jawaban responden mengenai Peranan auditor Internal Inspektor Daerah Kota Makassar menunjukkan bahwa total skor aktual yang di peroleh dari seluruh pertanyaan-pertanyaan yang membentuk peranan auditor internal sebesar 182 dan skor ideal sebesar 150, dengan nilai total presentase yang diperoleh sebesar 82,4%. Indikator auditor internal pada inspektorat di bagi menjadi 4 indikator yaitu: indikator Independensi, Indikator Kemampuan Profesional, Indikator Lingkup Pekerjaan, dan Indikator Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan termasuk dalam kategori baik. Ini menunjukkan bahwa auditor internal Inspektorat sangat berperperan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan pada pemerintah daerah, hal ini dikarenakan seorang auditor memiliki kemampuan untuk menilai secara objektif tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak pada kepentingan pihak-pihak tertentu. Penelitian ini sejalan dengan yang di kemukakan Zamzami et al., (2018) dalam bukunya Audit Internal Konsep dan Praktik, auditor internal akan menjunjung sikap objektif pada level tertinggi yang professional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yan diperiksa. Auditor internal akan membuat penilaian yang seimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau dengan orang lain dalam membentuk penlaian.

Auditor internal Inspektorat Daerah Kota Makassar sangat berperperan penting bagi walikota Makassar karena inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Pengawasan terhadap

unit kerja dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, melakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, efisien dan efektif, serta sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Yusriana salah satu auditor Muda Inspektorat Daerah kota Makassar:

“Dalam melakukan pengawasan, ada beberapa jenis pengawasan, yaitu pengawasan reguler, mencakup beberapa aspek yaitu tugas pokok dan fungsinya, aspek aparatur, belanja pegawai, keuangan, sarana dan prasarana aparat pemeriksa. Untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kemudian pemeriksaan khusus belanja modal, pemeriksaan sekolah-sekolah, dan juga pemeriksaan di puskesmas”.

Eksistensi inspektorat daerah kota Makassar semakin memunculkan ekspektasi yang besar dari masyarakat, juga dari pemerintah sebagai pemberi amanah melihat kedudukan inspektorat daerah kota Makassar yang berada pada suatu sistem pemerintahan. Jika dikaitkan dengan judul penelitian ini, adanya ekspektasi dari masyarakat ataupun pemerintah tersebut kepada inspektorat menyiratkan adanya *role theory*. Sejalan dengan peran yang menyatakan bahwa peran yaitu adanya suatu pengharapan terhadap suatu individu untuk bersikap dan berbuat berdasarkan status dan fungsinya. Adapun interaksi dengan masyarakat ataupun pemerintah, salah satunya ditunjukkan melalui adanya upaya optimalisasi pelayanan pengaduan masyarakat atau yang dikenal sebagai desk pengaduan yang terdapat dalam inspektorat daerah kota Makassar. Hal tersebut sebagai mana yang di katakan ibu Yusriana selaku auditor muda inspektorat :

“biasanya ada pengaduan orang tertentu di SKPD atau kepala SKPD yang langsung melakukan pengaduan keinspektorat untuk diperiksa, ada juga langsung kita turun cari dan ada juga SKPD yang langsung mengadu kesini untuk bisa ditindaklanjuti”

Inspektorat Daerah Kota Makassar diharapkan dapat menjalankan tugas yang merupakan kewajibannya dalam rangka menyukseskan jalannya pemerintahan daerah serta sebagai aparat pengawas daerah dengan memastikan seluruh kegiatan aktivitas pemerintahan tetap berada pada koridor dan tidak melanggar aturan yang berlaku demi terciptanya pemerintahan yang bersih.

2. Pendeteksian Kecurangan Pada Pemerintah Kota Makassar

Pendeteksian kecurang diukur menggunakan 5 (Lima) jawaban responden. Tabel Peranan Auditor Internal dapat dilihat berikut ini:

Tabel. .4.33. Rekapitulasi jawaban Pendeteksian Kecurangan

	Total Jawaban Ya	Persentase (%)	Total Jawaban Tidak	Persentase (%)	Total Pertanyaan
Pendeteksian Kecurangan	54	83%	11	17%	65

Sumber : Data Kuesioner Penelitian

$$\text{Presentase} = \frac{54}{65} \times 100 = 83\%$$

Berdasarkan hasil analisis skor jawaban responden mengenai Pendeteksian kecurangan oleh auditor Internal Inspektor Daerah Kota Makassar menunjukkan bahwa total skor aktual yang di peroleh dari seluruh pertanyaan-pertanyaan sebesar 65 dan skor ideal sebesar 54, dengan nilai total presentase yang diperoleh sebesar 83% dengan

jawaban “Ya” dan 11 atau 17% jawaban tidak. Hal ini menunjukkan bahwa Pendeteksian Kecurangan pada Pemerintah Kota Makassar oleh inspektorat telah sangat berjalan efektif karena jawaban “ Ya” berkisar antara 76%-100%, sedangkan 11 atau 17% jawaban “Tidak” dipengaruhi oleh beberapa factor seperti Sumber Daya Manusia, dalam hal ini seperti kurangnya jumlah auditor, uditor yang tersedia jumlahnya masih terbatas jika dibandingkan dengan objek pemeriksaan yang ada. Berdasarkan data kepegawaian inspektorat daerah kota Makassar, pejabat fungsional auditor hanya berjumlah 23 orang, ini masih tergolong sedikit. Faktor kedua yang menghambat yaitu ketepatan waktu, alasannya yaitu dengan banyaknya objek pemeriksaan ditambah masih kurangnya tenaga auditor sehingga mengakibatkan waktu dalam melakukan pemeriksaan belum sesuai dan masih belum tepat dimana setiap bulan hanya 2-3 surat penugasan untuk melakukan pengawasan, dan factor ketiga yaitu antusiasme yaitu terkait kesadaran objek pemeriksaan atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang di periksa masih tergolong rendah. Tekait hal tersebut ibu Yusriana mengatakan:

“Kalau kendala Sebenarnya tergantung dari si kapala SKPD terkait juga, biasanya kalau kita mau konfirmasi biasanya SKPD menutup diri, sengaja menghindari, biasanya kendalanya seperti itu biasa juga dokumennya tidak ada, misalkan kita turun untuk minta dokumen yang lebih rinci itu dokumennya tidak ada, itu yang terbatas.

Pada dasarnya audit internal pemerintah merupakan pendamping pemerintah dalam penyelenggaraan daerah baik segi keuangan ataupun non-keuangan. Audit internal menentukan apakah kebijakan dan prosedur pemerintah telah diikuti dan dijalankan diseluruh lapisan badan ataupun instansi pemerintahan. Sebab erat kaitannya ketidak sesuaian kebijakan

dan prosedur pemerintah yang telah dibuat dengan pelanggaran ataupun tindakan penyimpangan. Dalam mengidentifikasi *fraud* itu sendiri seorang auditor internal harus memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi *fraud* seperti punya skill atau pendidikan, ikut serta dalam diklat, dan kemampuan berdasarkan penguasaan dalam memeriksa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kiswanto.,et al. (2019) yang menyatakan penilaian resiko kecurangan, skeptisisme, beban kerja dan pengalaman berpengaruh pada kemampuan mendeteksi kecurangan. Pengalaman memperkuat pengaruh penilaian resiko kecurangan pada kemampuan mendeteksi kecurangan.

Jika ditinjau dari seluruh kegiatan yang terkait dengan kecurangan, inspektorat berperan dalam mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi kecurangan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa terdapat ribuan pegawai di seluruh SKPD yang berada di Pemerintah Kota Makassar. Dalam upaya untuk mendeteksi kecurangan melalui beberapa tahapan tersebut seperti yang dikutip dalam wawancara dengan ibu Yusriana selaku auditor muda:

“melalui pemeriksaan regular, didalam pemeriksaan regular ada pemeriksaan kepegawaian, kita periksa pegawai itu biasanya kalau mendeteksi fraud itu kita harus melihat kinerja pegawai ini, bagaimana kinerjanya dia membuat pertanggung jawabannya. Biasanya kalau kelihatan yang kinerjanya buruk pasti ada masalah disitu”

Dari hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa auditor melihat kecurangan sebagai hal yang sangat potensial dalam setiap SKPD. Oleh karena itu, auditor melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap SKPD dengan tujuan melakukan pencegahan dan pendeteksiaan dini terhadap kecurangan. Secara kelmbagan terdapat

upaya-upaya nyata oleh inspektorat daerah kota Makassar yang dilancarkan keseluruh institusi sebagai tindakan pencegahan dan pendeteksian kecurangan, diantaranya:

- a) Melakukan pemeriksaan regular/komprehensif terhadap seluruh SKPD
- b) Melakukan review laporan keuangan
- c) Melakukan pemeriksaan untuk tujuan tertentu
- d) Melakukan evaluasi LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja pemerintah)
- e) Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah kota
- f) Melakukan pengecekan terkait serah terima jabatan

Pentingnya auditor internal dalam mendeteksi fraud sejalan dengan hasil laporan ACFE tahun 2010 menjelaskan 60% responden mengatakan bahwa auditor internal memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya untuk mendeteksi terjadinya fraud. penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Rozmi dan Nelly, 2010) yang mengungkapkan bahwa 62.5% responden mengatakan bahwa manajemen review memiliki peran terpenting dalam upaya pendeteksian dan pembatasan tindakan fraud.

3. Pencegahan Kecurangan pada Pemerintah Kota Makassar

Pencegahan kecurangan diukur menggunakan 7 (Tujuh) jawaban responden. Tabel Peranan Auditor Internal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 4.34 Tabel Rekapulasi Pencegahan Kecurangan

	Total Jawaban Ya	Persentase (%)	Total Jawaban Tidak	Persentase (%)	Total Pertanyaan
Pencegahan Kecurangan	67	74%	24	26%	91

Sumber : Data Kuesioner Penelitian

$$P_{\text{presentase}} = \frac{67}{91} \times 100 = 74\%$$

Berdasarkan hasil analisis skor jawaban responden mengenai Pendeteksian kecurangan oleh Inspektor Daerah Kota Makassar menunjukkan bahwa total skor aktual yang di peroleh dari seluruh pertanyaan-pertanyaan sebesar 91 dan skor ideal sebesar 64, dengan nilai total presentase yang diperoleh sebesar 74% jawaban “Ya” dan 24 atau 26% jawaban “Tidak”. Hal ini menunjukkan bahwa auditor internal inspektorat daerah kota Makassar berjalan efektif dalam mencegah kecurangan pada daerah kota Makassar karena jawaban “Ya” berkisar antara 51%-75%, sedangkan 24 atau 26% jawaban “Tidak” karena beberapa factor yang menyebabkan belum maksimalnya dalam pencegahan kecurangan. Faktor-faktor tersebut seperti lemahnya dalam penetapan anti *Fraud* , belum adanya pengawasan yang ketat terhadap semua aspek yang memungkinkan terjadinya *Fraud* , kurangnya media yang digunakan untuk menampung informasi berkaitan dengan kecurangan, dan kurangnya tim khusus untuk mencegah terjadinya kecurangan, hal ini dikarenakan masih kurangnya auditor internal pada inspektorat, mengingat banyaknya objek pemeriksaan yang ada.

Pencegahan kecurangan biasanya dianalogikan dengan penyakit yaitu lebih baik dicegah dari pada diobati. Jika menunggu terjadinya fraud baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, dibandingkan bila kita berhasil mencegah tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku fraud tersebut. Bila fraud sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya dari pada melakukan pencegahan sejak dini. Untuk melakukan pencegahan, setidaknya ada tiga upaya yang harus dilakukan yaitu:

- 1) membangun individu yang didalamnya terdapat *trust and openness*, mencegah benturan kepentingan, *onfidential disclosure agreement* dan *corporate security contract*.
- 2) Membangun sistem pendukung kerja yang meliputi system yang terintegritas, standarisasi kerja, aktifitas *control* dan *system rewards and recognition*.
- 3) Membangun sistem monitoring yang didalamnya terkandung *control selfassessment*, internal auditor dan ekstral auditor.

Dalam upaya pencegahan *fraud* melalui beberapa tahapan tersebut, kemudian seperti yang dikutip dalam wawancara dengan ibu Yusriana :

“Beberapa cara untuk mencegah terjadinya fraud yaitu dengan adanya pengawasan yang melekat pada pimpinan teratas, SPI harus kuat pada SKPD, dan adanya evaluasi kegiatan serta pengawasan yang melekat”

Berdasarkan uraian yang ada auditor internal yang ada di inspektorat daerah kota Makassar menjalankan fungsinya berdasarkan *job descriton* yang telah ditentukan, pihak uditor internal harus

memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang diperiksa guna untuk pembuatan perencanaan pemeriksaan.

Inspektorat Daerah Kota Makassar jika dilihat dari data kuesioner Peranan Auditor Internal dalam Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan pada Pemerintah Kota Makassar. Dari 26 pertanyaan pada 13 responden terdapat 271 atau 80.2% ($271:338 \times 100$) jawaban "Ya" dan hanya terdapat 67 atau 19.8% jawaban "Tidak". Maka dari itu dapat disimpulkan peranan auditor internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan sudah berjalan sangat efektif.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Norsain (2014) yang menyatakan bahwa internal audit yang dilaksanakan pada PNPM Mandiri Kecamatan Kaliaget sudah cukup memadai dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan.

Festi T, et.,al. (2014) juga menyimpulkan bahwa peran audit Internal berpengaruh terhadap pencegahan penipuan. Ini berarti bahwa peran audit internal adalah lebih baik, sebagai hasil pencegahan fraud menjadi meningkat.

Pane. A. (2018) dengan Judul Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kecurangan: Survei pada Pemrof Sumatera Utara, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dari hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Berpengaruh Signifikan terhadap perilaku kecurangan.

Auditor Internal Inspektorat Daerah Kota Makssar sangat berperan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan pada Pemerintah Kota

Makassar yang menggambarkan bahwa kecurangan dapat di atasi dengan baik dengan adanya audit internal sebagai pengawas intern untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan bersifat objektif serta dapat memberikan saran dan pengawasan pada setiap SKPD. selain itu auditor internal dapat melakukan review dan mmberikan kesimpulan apakah setiap pelaksanaan aktivitas telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau tidak. Serta melakukan tidak lanjut dan memberikan rekomendasi kepada tiap SKPD yang menjadi objek pemeriksaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan audit internal sangat berperan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan pada pemerintah kota Makassar sebagai pengawas intern dan mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang disebabkan oleh pihak-pihak tertentu, hal ini dikarenakan seorang auditor harus memiliki kemampuan agar dapat menilai secara objektif sehingga ketika seorang auditor menemukan adanya fraud yang diaudit maka seorang auditor akan mengungkapkan bahwa terdapat penyimpangan dan dapat memberikan saran serta melakukan review terhadap laporan keuangan untuk mengatasi penyimpangan tersebut.
2. Dilihat dari hasil analisis kuesioner menunjukkan bahwa Peranan Auditor Internal Inspektorat sudah sangat berjalan sangat efektif dengan presentase 82.4% responden menjawab "Ya" yang berkisar antara 76%-100%, Pendeteksian Kecurangan sudah sangat berjalan efektif dengan presentase 83% responden menjawab "Ya" yang berkisar antara 76%-100%, dan Pencegahan Kecurangan berjalan efektif dengan presentase 74% responden menjawab "Ya" yang berkisar antara 51%-75%. Ini menunjukkan bahwa Auditor Internal Inspektorat Daerah Kota Makassar sangat berperan dalam

mendeteksi dan mencegah kecurangan pada Pemerintah Kota Makassar.

3. Berdasarkan data kuesioner Peranan Auditor Internal dalam Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan pada Pemerintah Kota Makassar. Dari 26 pertanyaan pada 13 responden terdapat 271 atau 80.2% ($271:338 \times 100$) jawaban "Ya" dan hanya terdapat 67 atau 19.8% jawaban "Tidak". Maka dari itu dapat disimpulkan peranan auditor internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan sudah berjalan sangat efektif

B. Saran

1. Untuk Inspektorat Daerah Kota Makassar

- a. Harus Memperkuat dan memperkokoh Jaringan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kota Makassar
- b. Dengan kuatnya system pengendalian internal maka dapat mencegah beberapa kasus yang berkaitan dengan ada kecurangan dan bisa meminimalisir kecurangan tersebut.
- c. Lebih banyak diadakan pelatihan-pelathan di bidang audit, semakin lama maka akan semakin berkembang sehingga *upgreading* pengetahuan dan skill bagi auditor perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan juga kualitas auditnya. Diperlukan danya media yang di gunakan untuk menampug atau mendeteks informasi yang berkaitan dengan kecurangan juga sangat di perlukan sehingga memudahkan bagi auditor untuk mendeteksi berbagai kecurangan

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini hanya terdapat 13 responden auditor internal dan 1 (satu) informan wawancara dengan 1 (satu) objek penelitian/ satuan kerja perangkat daerah (SKPD), oleh karena itu penelitian menyarankan agar penelitian selanjutnya menambahkan jumlah responden dan objek penelitiannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, F dan Deny, A.K. 2007. *Audit dan Assurance Teknologi Informasi*. Edisi 2 Buku 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Fitrah dan Luthfiah. 2017. *Metodologi Penelitian, penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Sudi Kasus*. Penerbit CV Jejak. Jawa Barat.
- Hery., 2010. *Auditing and Asurans*. Penerbit PT Gasindo. Jakarta
- Harwida, et al., 2018. Menyingkap Lakon Auditor Internal Pemerintah dalam Melakukan Deteksi dan Pencegahan Fraud di Perguruan Tinggi. *Journal of Applied Accounting and Taxation*. Vol 3
- Kompas .Com. 2018. Ketua KPK: pertumbuhan indeks persepsi korupsi di Indonesia tertinggi di dunia.(Online)(<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/10400111/ketua-kpk-pertumbuhan-indeks-perepsi-korupi-indonesia-tertinggi-didunia> diakses 4 Maret 2019)
- Kiswanto, Maulana. A. Panji, 2019. Pengalaman Moderisasi Penilaian Resiko Kecurangan, Skeptitisme, Beban Kerja pada Kemampuan Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, (Online) Vol. 14, No. 2. universitas Negeri Semarang.
- Nugraheni, B.S dan Mustikawati, 2016. Peran Audit Internal sebagai Alat Bantu Manajemen untuk Menunjang Keefektifan Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Wates. 2 *Jurnal Profita* Edisi Tahun 2016.
- Pane, A. A, 2018. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kecurangan: Survei pada Pemprof Sumatra Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4 (2).

Pua Y. B, Sondkh J. J, dan Pangerapan S. 2017. Evaluasi Fungsi Auditor Internal dalam Mendeteksi dan Mencegah Fraud pada PDAM Airmadidi. *Jurnal riset akuntansi going concern 12(2), 2017, 452-469*. Universitas Sam ratuangi.

Profil Inspekrat Daerah Kota Makassar 2017.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007, Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Salsabila A., dan Prayudiawan H. 2011. Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan Auditing Dan Gender Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor Internal. *Jurnal dan Telaah Riset Akuntansi*. Vol. 4. 1 Juli 2011

Tampubolon, R. 2005. *Risk and Systems-Based Internl Audit*. PT Alex Media Komputindo. Jakarta

Usman, S. 2017. Analisis Fakto-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Sektor Pemerintahan (Studi pada SKPD kabupaten Luwu Timur). *Skripsi*. Universitas. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wahyuni S, 2013. Analisis Peranan Audit Internal dalam Mendeteksi Kecurangan pada Pemerintahan Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.

Wawan, S dan Sekar, R. 2017. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017. *Survei Antara Pelaku Usaha di 12 Kota di Indonesia*.

Zamzami, F., Faiz, A. I., dan Mukhlis. 2018. *Audit Internal Konsep dan Praktik (Sesui International Standards For The Professional Practice Of Internal Auditing 2013)*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Website:

<https://makassar.tribunnews.com/amp/2017/12/07/di-dprd-luwu-timur-kpk-beberkan-ite-apbd-rawan-korupsi> (diakses 6 Maret 2019).

L

A

M

P

I

R

A

N



KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth

Bapak/Ibu/ Saudara Responden

Di Tempat

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Maka untuk keperluan tersebut saya sangat membutuhkan data-data analisis sebagai daftar kuesioner terlampir. Adapun judul skripsi yang saya ajukan dalam penelitian ini adalah **“Analisis Peranan Auditor Internal dalam Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan pada Pemerintah Kota Makassar”**.

Atas kesediaan dan bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab kuesioner ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Hormat saya

Anita

A. Data Responden

Isilah dengan singkat dan jelas berdasarkan data diri Bapak/Ibu/Saudara.

1. Nama Responden : _____
2. Usia : < 25 26-30
 31-35 36-40
 >41
3. Jeniskelamin : Laki-laki Perempuan
4. Pendidikan Terakhir : D3 S1
 S2 S3
5. Jabatan :
6. Lama bekerja : < 1 tahun 1-3 tahun
 4-5 tahun > 5 tahun

Butir pertanyaan diisi dengan jawaban yang sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Saudara didalam kotak jawaban yang telah di sediakan.

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Isilah setiap daftar pertanyaan yang diajukan dengan jawaban yang saudara anggap paling sesuai
2. Memberikan tanda (√) pada jawaban:
 - a. Ya

b. Tidak

c. Komentar (boleh diisi pada kolom komentar untuk mempejelas jawaban yang anda berikan)

KUESIONER

ANALISIS PERANAN AUDITOR INTERNAL DALAM MENDETEKSI DAN MENCEGAH KECURANGAN (*FRAUD*) PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

A. PERANAN AUDITOR INTERNAL

No	Pertanyaan	Jawaban		Komentar
		Ya	Tidak	
Independensi				
1.	Apakah hubungan auditor internal dengan unit yang di audit berlaku hanya pada saat dilakukan audit, bukan sebagai mitra dalam menyelesaikan tugas?			
2.	Apakah dalam menjalankan kantugasnya, auditor internal telah memeriksa kegiatan dimana mereka memiliki kewenangan atau tanggung jawab di dalamnya?			
3.	Apakah hasil pekerjaan auditor internal ditinjau dahulu sebelum laporan pekerjaan di keluarkan, dengan tujuan untuk memberikan jaminan bahwa pekerjaan auditor internal telah terlaksana secara objektif			
4.	Apakah auditor internal bertanggung jawab kepada unit audit internal			
5.	Apakah auditor internal tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan salah seorang pimpinan atau staf Dari objek yang sedang di audit			

6.	Apakah antara audit internal dengan bagian dari objek yang sedang di audit tidak sering terjadi konflik saat pengungkapan yang benar			
Kemampuan Profesional				
7.	Apakah setiap staf auditor internal mendapatkan sanksi jika pekerjaan yang di laksanakan tidak sesuai dengan standar profesi yang berlaku			
8.	Apakah bagian dari auditor internal memiliki pegawai yang berkualifikasi dalam berbagai disiplin ilmu untuk melaksanakan tanggungjawab pemeriksaan			
9.	Apakah staf auditor internal telah dan lulus dalam menjalani pelatihan bidang audit internal lewat masa pendidikan			
Lingkup Pekerjaan				
10.	Apakah dalam menentukan keandalan informasi, pihak auditor internal juga melakukan pengawasan yang efektif termasuk penyimpangan pencatatan dan pelaporan			
11.	Apakah dalam melaksanakan pekerjaannya, auditor internal bertugas memastikan bahwa sistem yang ditetapkan oleh unit/SKPD telah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, dan prosedur yang diterapkan			
Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan				
12.	Apakah pihak auditor internal harus memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang di periksa guna pembuatan perencanaan pemeriksan			
13.	Apakah pihak auditor internal harus mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi dengan pihak manajemen sebelum mengeluarkan laporan akhir			

14.	Apakah staf auditor internal sangat perlu melakukan monitor terhadap tindak lanjut untuk memastikan bahwa pihak manajemen telah melakukan tindakan yang tepat terhadap temuan audit yang di laporkan			
-----	--	--	--	--

B. PENDETEKSIAN KECURANGAN (Fraud)

No.	Pertanyaan	Iya	Tidak	Komentar
1.	Apakah audit internal sudah melakukan identifikasi resiko terjadinya kecurangan pada unit/SKPD yang diaudit?			
2.	Apakah auditor internal sudah melakukan pengawasan terhadap resiko kecurangan yang terjadi di lapangan?			
3.	Apakah audit internal sudah melakukan verifikasi transaksi dan analisis data untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kecurangan pada SKPD			
4.	Apakah audit internal sudah menerapkan prosedur mendeteksi kecurangan secara memadai?			
5.	Apakah pihak manajemen sudah membuka media audit untuk menerima masukan atau pengaduan tindakan kecurangan yang mungkin saja terjadi			

C. PENCEGAHAN KECURANGAN (Fraud)

No.	Pertanyaan	Iya	Tidak	Komentar
1.	Apakah audit internal sudah menetapkan anti fraud ?			
2.	Apakah auditor internal sudah melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua aspek yang memungkinkan untuk terjadinya kecurangan			

3.	Apakah ada system pengendalian internal yang memadai untuk mencegah terjadinya kecurangan?			
4.	Apakah ada pemisahan yang jelas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing unit			
5.	Adakah media yang digunakan untuk menampung informasi yang berkaitan dengan kecurangan?			
6.	Apakah ada tim khusus yang dibentuk untuk mencegah terjadinya kecurangan?			
7.	Apakah ada tindak lanjut yang cepat atas temuan kecurangan ?			



Tabel. Perhitungan Skor Peranan Auditor Internal

Responden	JAWABAN KUESIONER PERAN AUDTOR INTENAL														Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	11
2	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	11
3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
4	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
5	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	11
7	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	12
8	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
9	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	12
10	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	13
11	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	13
12	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	13
13	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
Total	7	13	12	11	8	6	12	9	13	12	12	12	11	12	150

Tabel Persentase Peranan Auditor Internal

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Apakah hubungan auditor internal dengan unit yang diaudit		

	berlaku hanya pada saat dilakukan audit, bukan sebagai mitra dalam menyelesaikan tugas?	7	6
2.	Apakah dalam menjalankan tugasnya, auditor internal telah memeriksa kegiatan dimana mereka memiliki kewenangan atau tanggung jawab di dalamnya?	13	0
3.	Apakah hasil pekerjaan auditor internal ditinjau dahulu sebelum laporan pekerjaan di keluarkan, dengan tujuan untuk memberikan jaminan bahwa pekerjaan auditor internal telah terlaksana secara objektif	12	1
4.	Apakah auditor internal bertanggung jawab kepada unit audit internal	11	2
5.	Apakah auditor internal tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan salah seorang pimpinan atau staf dari objek yang sedang di audit	8	5
6.	Apakah antara audit internal dengan bagian dari objek yang sedang di audit tidak sering terjadi konflik saat pengungkapan yang benar	6	7
Jumlah jawaban tentang Independen		57 (73%)	21 (27%)
7.	Apakah setiap staf auditor internal mendapatkan sanksi jika pekerjaan yang di laksanakan tidak sesuai dengan standar profesi yang berlaku	12	1
8.	Apakah bagian dari auditor internal memiliki pegawai yang		

	berkualifikasi dalam berbagai disiplin ilmu untuk melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan	9	4
9.	Apakah staf auditor internal telah dan lulus dalam menjalani pelatihan bidang audit internal lewat masa pendidikan	13	0
Jumlah jawaban tentang Kemampuan Profesional		34	5
		(87.2%)	(12.8%)
10.	Apakah dalam menentukan keandalan informasi, pihak auditor internal juga melakukan pengawasan yang efektif termasuk penyimpangan pencatatan dan pelaporan	12	1
11.	Apakah dalam melaksanakan pekerjaannya, auditor internal bertugas memastikan bahwa sistem yang ditetapkan oleh unit/SKPD telah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, dan prosedur yang diterapkan	12	1
Jumlah jawaban tentang Lingkup Pekerjaan		24	2
		(92.3%)	(7.7%)
12.	Apakah pihak auditor internal harus memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang di periksa guna pembuatan perencanaan pemeriksian	12	1
13.	Apakah pihak auditor internal harus mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi dengan pihak manajemen sebelum mengeluarkan laporan akhir	11	2
14.	Apakah staf auditor internal sangat perlu melakukan monitor terhadap tindak lanjut untuk memastikan bahwa pihak	12	1

manajemen telah melakukan tindakan yang tepat terhadap temuan audit yang di laporkan		
Jumlah jawaban tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan	35 (89.7%)	4 (10.3%)
Total Jawaban tentang Peranan Auditor Internal	150 (82.4%)	32 (17.6%)

Table. Skor Perhitungan Pendeteksian Kecurangan

Responden	Jawaban Kuesioner Pendeteksian Kecurangan					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	0	0	1	0	0	1
2	0	1	1	1	0	3
3	0	1	1	1	0	3
4	0	1	1	1	0	3
5	1	1	1	1	1	5
6	1	1	1	1	1	5
7	1	1	1	1	0	4
8	1	1	1	1	1	5
9	1	1	1	1	1	5
10	1	1	1	1	1	5
11	1	1	1	1	1	5
12	1	1	1	1	1	5
13	1	1	1	1	1	5
Total	9	12	13	12	8	54

1	1	1	1	1	0	1	1	6
2	1	1	1	1	1	1	1	7
3	1	1	1	1	1	1	1	7
4	1	1	1	1	1	1	1	7
5	1	1	1	1	1	0	1	6
6	1	1	1	1	0	1	1	6
7	0	1	1	1	1	1	1	6
8	1	1	1	1	1	1	1	7
9	1	1	1	1	1	0	1	6
10	0	0	1	1	0	0	1	3
11	0	0	1	1	0	0	1	3
12	0	0	0	1	0	0	1	2
13	0	0	0	1	0	0	0	1
Total	8	9	11	13	7	7	12	67

Table Persentase Pencegahan Kecurangan

No	Pertanyaan	Jawaban	
		Ya	Tidak
1.	Apakah audit internal sudah menetapkan anti fraud ?	8	5
2.	Apakah auditor internal sudah melakuka pengawasan yang ketat terhadap semua aspek yang memungkinkan untuk terjadinya kecurangan	9	4

3.	Apakah ada sistem pengendalian internal yang memadai untuk mencegah terjadinya kecurangan?	11	2
4.	Apakah ada pemisahan yang jelas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing unit	13	0
5.	Adakah media yang digunakan untuk menampung informasi yang berkaitan dengan kecurangan?	7	6
6.	Apakah ada tim khusus yang dibentuk untuk mencegah terjadinya kecurangan?	7	6
7.	Apakah ada tindak lanjut yang cepat atas temuan kecurangan ?	12	1
	Total jawaban tentang Pencegahan Kecurangan	67	24
		(74%)	(26%)

Sumber : Data yang diolah, 2019

BIOGRAFI PENULIS



Anita. Lahir di Tompong, Manggarai Timur Flores Nusa Tenggara Timur pada 11 November 1995 dari pasangan suami istri Bapak Mursan dan Ibu Baeti. Peneliti adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln. Sultan Alauddin 2 lorong 10, kel. Mangasa, kec. Tamalate, Kota Makassar.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SDK Tompong lulus tahun 2008, MTs Al- Qalam Tompong lulus pada tahun 2011, MAs Al- Qalam Tompong lulus pada tahun 2014. Dan mulai tahun 2015 mengikuti program S1 Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.